



**ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAN PENDAPATAN
PEMERINTAH TERHADAP BELANJA MODAL
DI PROVINSI JAWA TIMUR**

TESIS

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Akutansi (S2) dan memperoleh gelar Magister Akutansi

Oleh:

EDY SUYITNO

NIM. 160820301020

**MAGISTER AKUTANSI
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS JEMBER
2020**

PERSEMBAHAN

Dengan segala Puji Syukur Alhamdulillahirobbil'alaminn, tesis ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua Orangtua saya tercinta Bpk. Kuswanto dan Ibu Nuryani
2. Kedua Mertua Saya tercinta Bpk Gigik dan Ibu Sri Endang
3. Istri saya tercinta Eka Maharani S.E dan anak saya tercinta Erina Chessy Almahyra
4. Adek Saya Rio.Rizky.Aby.Tiara. dan Sikembar Akbar Dan Angga
5. Bapak Dosen Pembimbing, Bapak Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak., CA. selaku dosen pembimbing utama dan Ibu Dr. Yosefa Sayekti, M.Com, AK. selaku pembimbing anggota yang telah membimbing dan mengarahkan dalam proses penulisan tugas akhir Tesis ini.
6. Seluruh Guru-guru saya dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi.
7. Temen Temen PT. RAJENDRA PRATAMA JAYA yang Telah Membantu Saya Mencari data Untuk Menyelesaikan Tesis Saya
8. Almamater Program Studi Magister Akutansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

MOTTO

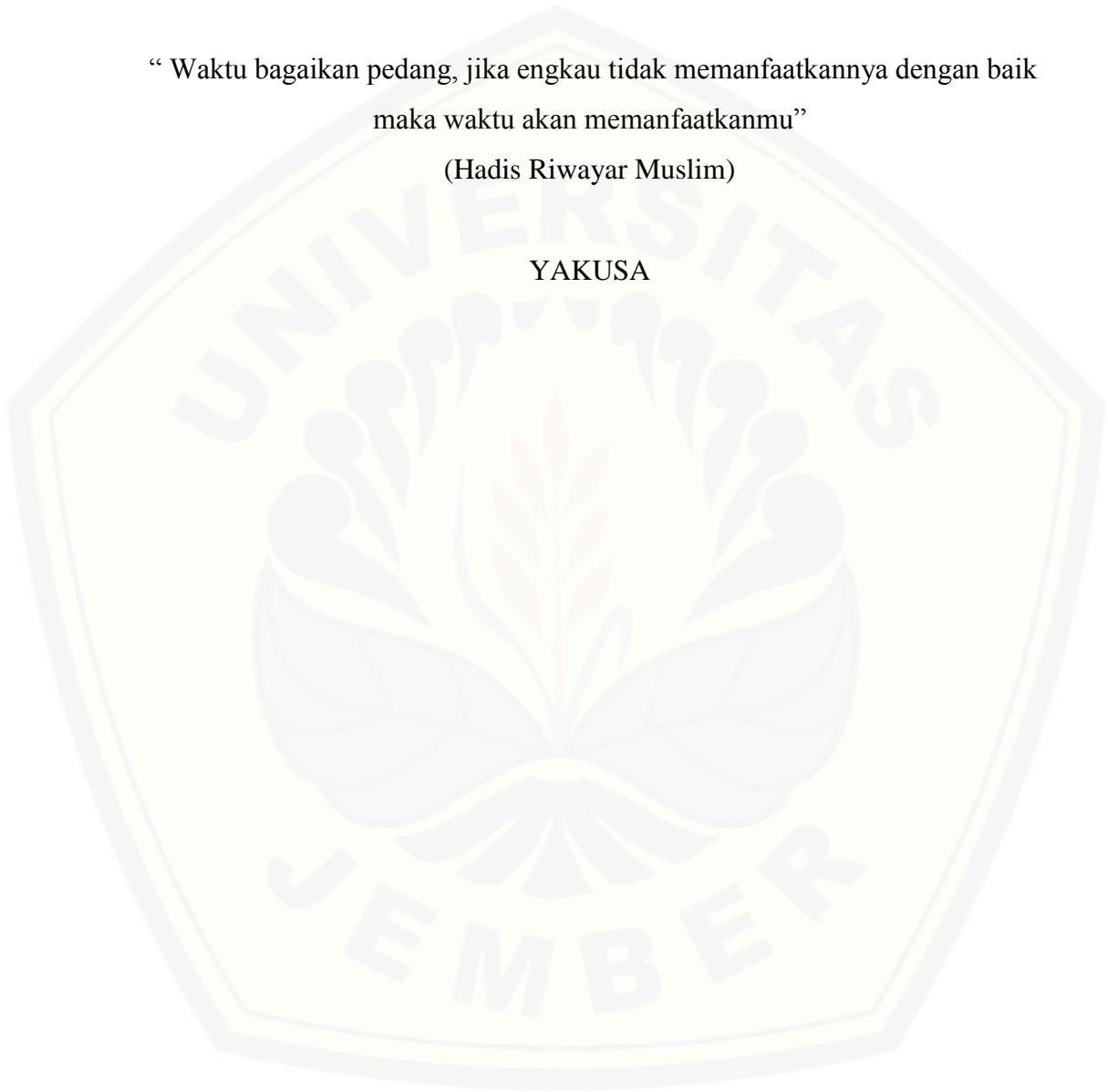
“Berpikir Positif akan membiarkan anda melakukan segala sesuatu lebih baik daripada berpikir negatif”

(Zig-Ziglar)

“Waktu bagaikan pedang, jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik maka waktu akan memanfaatkanmu”

(Hadis Riwayat Muslim)

YAKUSA



PERNYATAAN

Nama : EDY SUYITNO

NIM : 160820301020

Jurusan/Prodi : Akutansi / Magister Akutansi

Judul Tesis : Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan dan Pendapatan Pemerintah Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur.

Menyatakan bahwa tesis yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri. Apabila ternyata dikemudian hari tesis ini ditemukan bahwa tesis ini merupakan hasil dari plagiasi atau penjiplakan, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan dan meneriam sanksi berdasarkan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan yang saya buat ini tidak benar.

Jember, 07 Oktober 2020.

Yang menyatakan

Edy Suyitno

NIM. 160820301020

TESIS

**ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAN PENDAPATAN
PEMERINTAH TERHADAP BELANJA MODAL
DI PROVINSI JAWA TIMUR**

Oleh

Edy Suyitno

NIM. 160820301020

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak., CA.

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Yosefa Sayekti, M.Com, AK.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan dan Pendapatan
Pemerintah Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi
Jawa Timur.

Nama : Edy Suyitno

NIM : 160820301020

Jurusan/Prodi : Akutansi / Magister Akutansi

Disetujui Tanggal : 12 Oktober 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak., CA
NIP. 197107271995121001

Dr. Yosefa Sayekti, M.Com., AK.
NIP. 196408091990032001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi S2 Akutansi

Dr. Siti Maria Wardayati, M.Si., Ak.
NIP.196608051992012001

PENGESAHAN

Tesis berjudul “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Pendapatan Pemerintah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Jawa Timur” Karya Edy Suyitno telah diuji dan disahkan pada:

Hari, Tanggal : 12 Oktober 2020

Tempat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Tim Penguji

Ketua

Dr. Ahmad Roziq, S.E., M.M., AK.

NIP. 197004281997021001

Anggota I.

Dr. Alwan Sri Kustono, M.Si., Ak.

NIP. 197204162001121001

Anggota III.

Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak.

NIP.197107271995121001

Anggota II

Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si., Ak.

NIP. 197809272001121002

Anggota IV

Dr. Yosefa Sayekti, M.Com., AK. NIP.

196408091990032001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember



Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak.

NIP.197107271995121001

RINGKASAN

Belanja daerah menjadi komponen penting struktur anggaran keuangan daerah yang terdiri dari belanja modal, belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan beberapa belanja lainnya yang masuk dalam komponen anggaran. Salah satu yang menjadi komponen belanja paling penting adalah belanja modal karena memiliki pengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan akan memiliki banyak kontribusi untuk mengangkat pergerakan perekonomian daerah. Disilain, upaya pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui alokasi keuangan daerah yang terwujud dalam belanja modal tidak hanya dipengaruhi oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum yang dimiliki oleh masing-masing daerah tetapi juga dipengaruhi oleh kinerja keuangan daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan keterpengaruhannya antara pendapatan pemerintah yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum serta kinerja keuangan Pemerintah yang diproyeksi dengan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Pembiayaan Silpa, dan Rasio Efisiensi Keuangan di seluruh pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data Panel dengan jumlah *Cross Section* 38 Kabupaten dan Kota di seluruh Jawa Timur dan *Time series* 5 tahun yaitu 2015-2019. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode *Panel Least Square* (PLS) dengan tiga pengujian yaitu Model *Pooled Least Square* (PLS), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM) untuk melihat model mana yang paling baik untuk digunakan sebagai analisis dalam penelitian.

Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam pengujian model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model *Fixed Effect Model* (FEM). Dari hasil analisis dengan menggunakan model FEM menunjukkan bahwa variabel yang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pengeluaran modal pemerintah daerah di Jawa Timur yaitu variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan, dan

Rasio Efisiensi Keuangan. Kemudian dua variabel lainnya yaitu Rasio Efektivitas PAD dan Rasio pembiayaan SILPA tidak memengaruhi secara signifikan. Secara keseluruhan, seluruh variabel Independen memengaruhi variabel deppenden sebesar 91,6%.



ABSTRAK

Dalam pencatatan keuangan pemerintah daerah pos pengeluaran belanja modal merupakan salah satu bentuk pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan daerahnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Besar kecilnya pengeluaran belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak hanya dipengaruhi oleh besar kecilnya pendapatan daerah baik dari sisi Pendapatan Asli daerah tetapi juga dari transfer pemerintah seperti Dana Alokasi Umum, selain itu besarnya belanja modal juga dapat dipengaruhi oleh kinerja keuangan dari pemerintah daerahnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan keterpengaruhan antara pendapatan pemerintah yaitu Pendapatan Asli daerah dan Dana Alokasi Umum serta kinerja keuangan Pemerintah yang diproyeksi dengan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Pembiayaan Silpa, dan Rasio Efisiensi Keuangan. Penelitian ini dilakukan di seluruh pemerintah daerah di Jawa Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data Panel dengan metode analisis *Panel Least Square* (PLS). Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel yang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pengeluaran modal pemerintah daerah di Jawa Timur yaitu variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan, dan Rasio Efisiensi Keuangan.

Kata Kunci: Belanja Modal, Kinerja Keuangan, PLS, Panel, Jawa Timur.

PRAKATA

Alhamdulillahirobil'alamiin segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan, rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir tesis yang berjudul “ Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan dan Pendapatan Pemerintah Terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan di program studi S2 Magister Akutansi serta untuk memperoleh gelar Magister Akutansi.

Dalam proses penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., C.A., Ak. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
2. Dr. Yosefa Sayekti, M.Com., Ak. Selaku ketua Jurusan Akutansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember,
3. Dr. Siti Maria, M.Si, Ak. Selaku ketua Program Studi Magister Akutansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
4. Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., C.A., Ak Selaku Pembimbing Utama yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan baik secara moril maupun akademik kepada penulis demi tersusunnya tesis ini.
5. Dr. Yosefa Sayekti, M.Com., Ak selalu pembimbing anggota yang juga telah membimbing dan mengarahkan dengan baik dan sabar kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan tesis ini.
6. Kedua Orang Tua saya dan Kedua Mertua Saya
7. Istri Tercinta dan anak Tercinta
8. Temen – Temen Kerja Saya PT. RAJENDRA PRATAMA JAYA
9. Seluurh Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuangserta dukungan kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan tesis ini.

Penulis sadar bahwa karya tulis tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan masukan yang membangun guna penyempurnaan tesis ini. Penulis berharap karya tulis ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi penulis selanjutnya.

Jember, 12 Oktober 2020



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
RINGKASAN.....	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
PRAKATA.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12
2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU).....	13
2.1.3 Belanja Modal	14
2.1.4 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	17
2.1 Penelitian Terdahulu	24
2.3 Kerangka Konsep Penelitian.....	36
2.4 Hipotesis Penelitian.....	40
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	50
3.1 Jenis Penelitian	50
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian	50
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian	50
3.4 Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya	50
3.5 Metode Statistik	53
3.6 Pengujian dan Analisis Statistik	53

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	58
4.1 Gambaran Umum.....	58
4.2 Hasil Analisis Data	60
4.2.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif	60
4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik	63
4.3 Pembahasan Uji Hipotesis	72
BAB 5. KESIMPULAN	81
5.1 Kesimpulan	81
5.2 Keterbatasan Penelitian	81
5.3 Saran	82
5.4 Implikasi Penelitian	83
DAFTAR BACAAN.....	84
LAMPIRAN	90

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Penilaian Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal 21
Tabel 2.2	Pola Hubungan Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah 22
Tabel 2.3	Kriteria Penilaian Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah.. 23
Tabel 2.4	Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah 24
Tabel 2.5	Penelitian Terdahulu..... 32
Tabel 2.6	Kerangka Konsep Penelitian 40
Tabel 4.1	Hasil Uji Statistik Deskriptif 61
Tabel 4.2	Hasil Uji Normalitas 64
Tabel 4.3	Hasil Uji Multikolinearitas 64
Tabel 4.4	Hasil Uji Heteroskedastisitas 65
Tabel 4.5	Hasil Uji Autokorelasi 66
Tabel 4.6	Hasil Uji Pemilihan Model Data Panel 66
Tabel 4.7	Hasil Uji Fix Effect Model (FEM) 67
Tabel 4.8	Hasil Koefisien Determinasi (R^2) 69
Tabel 4.9	Hasil Uji F-Statistik 70
Tabel 4.10	Hasil Uji t Statistik 71

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1	Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur dalam Struktur APBD tahun 2017-2019 6
Gambar 4.1	Realisasi Belanja Modal di Jawa Timur 59
Gambar 4.2	Realisasi Belanja dan Transfer Daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2018 60



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Data Penelitian	90
Lampiran 2. Hasil Olahan Data	105



DAFTAR SINGKATAN

APBD	= Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	= Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BLUE	= Best Linear Unbiased Estimator
BUMD	= Badan Usaha Milid Daerah
DAK	= Dana Alokasi Khusus
DAU	= Dana Alokasi Umum
DBH	= Dana Bagi Hasil
FEM	= Fix Effect Model
LM	= Lagrange Multiplier
PAD	= Pendapatan Asli Daerah
PERPRES	= Peraturan Presiden
PLS	= Panel Least Square
REM	= Random Effect Model
SAKIP	= Sistem Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah
SEM	= Structural Equation Model
SiLPA	= Sisa lebih Pembiayaan Anggaran
UU	= Undang-Undang

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem pemerintahan di Indonesia mengalami perubahan dalam hal pengelolaan kekayaan negara dari yang awalnya dilakukan secara terpusat, kemudian dilakukan perubahan dengan cara pengelolaan secara desentralisasi. Hal ini dilakukan untuk memberikan alternatif pemecahan masalah lebih mendalam dan tepat yang terjadi diberbagai daerah di Indonesia. Kebijakan desentralisasi menjadi langkah strategis pemerintah pusat untuk mengatasi permasalahan lokal yang sering kali muncul di berbagai daerah baik permasalahan sosial, ekonomi, budaya dan lainnya. Selain itu, kebijakan desentralisasi juga mampu memberikan peluang besar pemerintah daerah untuk memperkuat perekonomian daerahnya masing-masing. Kebijakan desentralisasi ini berkaitan dengan munculnya otonomi daerah yang akan diterapkan untuk mengatasi permasalahan lokal daerah sekaligus meminimalisir perluasan permasalahan hingga ke pusat. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal Indonesia telah dilaksanakan mulai tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang mengatur tentang Pemerintah Daerah. Kemudian dilengkapi dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Adanya desentralisasi fiskal dan otonomi daerah ini memiliki dampak besar dalam pengembangan dan pembangunan daerah (Triyanto, et al. 2017). Selain itu, dengan adanya desentralisasi fiskal juga dapat meningkatkan efisiensi ekonomi dan efisiensi publik.

Otonomi daerah menjadi upaya pemerintah pusat dalam mengatasi berbagai permasalahan dan melimpahkan kewenangan dan pengelolaan kekayaan daerah untuk dikelola pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan menjadi sinyal pemerintah pusat untuk melimpahkan kewenangan pada pemerintah daerah. Kewenangan tersebut meliputi kewenangan dalam segala aspek, baik keuangan maupun kekayaan alam

yang berpotensi memberikan kesejahteraan bagi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 bahwa keberhasilan otonomi daerah harus didukung oleh kinerja pemerintah dalam mengelola kondisi keuangan daerah yang memadai dengan tertib, efektif, didasarkan pada aturan, transparan dan bertanggung jawab (Indiyanti dan Rahyuda, 2018). Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan dan potensi daerahnya diharapkan mampu mewujudkan daerah yang mandiri dan mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Pengelolaan daerah ini meliputi potensi yang ada di daerah tersebut baik berupa sumber daya alam, sumber daya manusia maupun dana dari sumber penghasilan dari potensi kekayaan daerah.

Berdasarkan UU no. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka keuangan daerah memiliki pengertian yang disesuaikan dengan UU tersebut bahwa Keuangan daerah merupakan seluruh hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang maupun barang yang dapat dan berpotensi memberikan manfaat dan dimiliki oleh daerah tersebut sehingga dapat memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan daerah (Nursadi, 2004). Oleh karena itu, keuangan daerah ini memiliki kompleksitas terkait anggaran daerah, baik berupa kekayaan milik daerah yang menghasilkan pendapatan bagi daerah maupun anggaran terkait keperluan dalam memenuhi kebutuhan daerah tersebut. Menurut Jin dan Jianhui (2011), daerah yang masih dalam tahap pembangunan memerlukan belanja modal yang lebih besar untuk mendorong peningkatan produktivitas dan pertumbuhannya. Selain itu, pasokan infrastruktur yang memadai juga menjadi instrumen penting untuk peningkatan pertumbuhan dan produktivitas daerah sehingga dapat tercapai pemenuhan kebutuhan daerah.

Paradigma pengelolaan keuangan daerah mengalami dinamika yang cukup signifikan semenjak diterapkannya otonomi daerah pada tahun 2001. Sistem pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara mandiri berorientasi pada kepentingan publik dan membawa tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah berbentuk keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah yang menjadi aspek penting dalam pengelolaan keuangan

daerah. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah ini dilakukan dengan sistem yang terintegrasi, terstruktur dan didasarkan pada peraturan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya (Praza, 2016). Pengelolaan keuangan daerah yang dituangkan dalam anggaran daerah setiap tahunnya harus berorientasi pada kepentingan publik, disusun dengan pendekatan kinerja, terdapat keterkaitan dengan *policy maker* daerah dalam mengambil kebijakan, dan berupaya untuk menghubungkan antara APBD, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah (Ulfa, 2013).

Pengelolaan keuangan daerah mayoritas dilakukan dengan menggunakan pendekatan kinerja keuangan yang berorientasi pada output, konsep nilai uang (*value for money*) serta penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Korompot dan Warongan, 2017). Kinerja pemerintah dapat ditinjau dari kinerjanya dalam menentukan porsi anggaran yang disusun sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki daerahnya. Hal ini diharapkan agar dapat memberikan peningkatan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Komponen keuangan daerah yang sangat penting meliputi belanja dan pendapatan. Belanja menjadi komponen penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga dapat mencapai kesejahteraan. Hal yang sama juga pada komponen pendapatan yang menjadi wadah untuk menata dan mengelola penghasilan dari potensi yang dimiliki suatu daerah.

Belanja daerah menjadi komponen penting struktur anggaran keuangan daerah yang terdiri dari belanja modal, belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan beberapa belanja lainnya yang masuk dalam komponen anggaran. PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa belanja modal merupakan bagian dari kelompok belanja daerah yang berwujud pengeluaran dalam rangka investasi aset tetap berwujud nilai manfaat yang dapat digunakan pada aktivitas pemerintah. Salah satu yang menjadi komponen belanja paling penting adalah belanja modal karena memiliki pengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan akan memiliki banyak kontribusi untuk mengangkat pergerakan perekonomian daerah (Kuncoro 2004 dan Praza, 2016). Sehingga pemerintah daerah perlu memberikan porsi yang besar sesuai keperluan

daerah dalam meningkatkan pembangunan dan mempercepat roda pergerakan ekonomi melalui belanja modal yang lebih besar.

Untuk meningkatkan belanja modal daerah diperlukan suatu kinerja keuangan daerah yang optimal sehingga dapat memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian daerah. Beberapa studi empiris menunjukkan temuan bahwa belanja modal pada pemerintah daerah dipengaruhi oleh kinerja keuangan daerah khususnya rasio ketergantungan, kemandirian, efektivitas PAD (Pendapatan Asli Daerah). Studi empiris Prihastuti, et al (2015) menemukan hasil bahwa kinerja keuangan secara langsung akan berdampak pada belanja modal. Sementara itu, dari studi empiris Nani dan Vitor (2012) menemukan bahwa belanja dan pendapatan suatu negara saling berhubungan satu dengan lainnya. Modal menjadi salah satu komponen belanja pemerintah yang paling penting dalam memperoleh porsi yang besar untuk membantu mendorong pergerakan ekonomi (Amuka, et al. 2016). Belanja modal ini meliputi pembiayaan dan investasi pada infrastruktur, modal utang publik dan transfer modal untuk pemerintah daerah serta lembaga pemerintah yang bersifat terdesentralisasi (Bojanic, 2013). Dari studi Hayode, et al (2015) menemukan hasil bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Terkait hal ini, pemerintah mencoba untuk meningkatkan belanja modal untuk keperluan publik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (Venkatarama dan Urmi, 2017).

Untuk meminimalisir defisit anggaran, diperlukan pengurangan ukuran pada pengeluaran yang besar untuk dialihkan pada belanja modal dan investasi (Nwosu dan Okafor, 2014). Belanja langsung yang dituangkan dalam bentuk belanja modal dapat memberikan kontribusi pada kualitas pelayanan publik sekaligus menambah sumber pendapatan daerah. Belanja modal dengan porsi yang lebih kecil tidak mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Alokasi pada belanja modal dilakukan dengan perimbangan keuangan yang cukup baik sehingga dapat tercapai peningkatan pelayanan publik yang diharapkan oleh masyarakat (Abu dan Abdullahi, 2010). Oleh karena itu, pemerintah harus mengendalikan pengeluaran lebih efektif terlebih untuk memprioritaskan alokasi infrastruktur. Alokasi belanja daerah yang lebih ditekankan pada belanja modal

akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat daerah (Patricia dan Izuchukwun, 2013; Indiyati dan Rahyuda, 2018).

Upaya pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui alokasi keuangan daerah melalui belanja modal ini juga dipengaruhi oleh kinerja keuangan daerah (Arsa dan Setiawina, 2015). Beberapa diantara kinerja keuangan daerah dapat ditinjau dari rasio kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah ini juga dapat digunakan sebagai penilai akuntabilitas dan kemampuan pemerintah dari sisi keuangan dalam menjalankan otonomi daerah. Kinerja keuangan sebagai bentuk pencapaian yang dimiliki pemerintah daerah dari hasil realisasi pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Kinerja keuangan yang baik dapat berpengaruh pada proporsi belanja modal yang sesuai untuk pelayanan publik (Riswan dan Affandi, 2014). Sehingga perubahan kinerja keuangan secara tidak langsung juga dapat berdampak pada perubahan proporsi belanja modal suatu daerah (Prihastuti, et al. 2015).

Komponen ini mencerminkan kondisi otonomi suatu daerah yang diukur dari perbandingan antara PAD dan jumlah total pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan pemerintah pusat, provinsi maupun pinjaman (Halim, 2008). Hasil studi yang dilakukan oleh Jatitmas, (2015) menemukan adanya pengaruh positif signifikan antara rasio kemandirian keuangan terhadap belanja modal. Selain itu, berbagai perdebatan empiris juga terjadi pada peranan PAD dan DAU (Dana Alokasi Umum) dalam memengaruhi belanja modal. Juniawan dan Suryanti (2018) menganalisis dampak PAD, DAU dan DAK terhadap belanja modal di kabupaten/kota di provinsi Bali. Hasilnya ditemukan adanya pengaruh positif signifikan variabel PAD, DAU dan DAK terhadap belanja modal di provinsi Bali. Hasil serupa pada kajian empiris Lestari et al, (2016) menemukan bahwa variabel DAU dan PAD menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap belanja modal dan kemandirian keuangan lokal. Sementara Badrudin dan Kuncorojati (2017) menganalisis pengaruh PAD dan dana perimbangan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasilnya menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh

signifikan terhadap belanja modal namun berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Studi Syam et al (2018) juga menemukan hasil bahwa variabel PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal di provinsi Kalimantan Selatan.

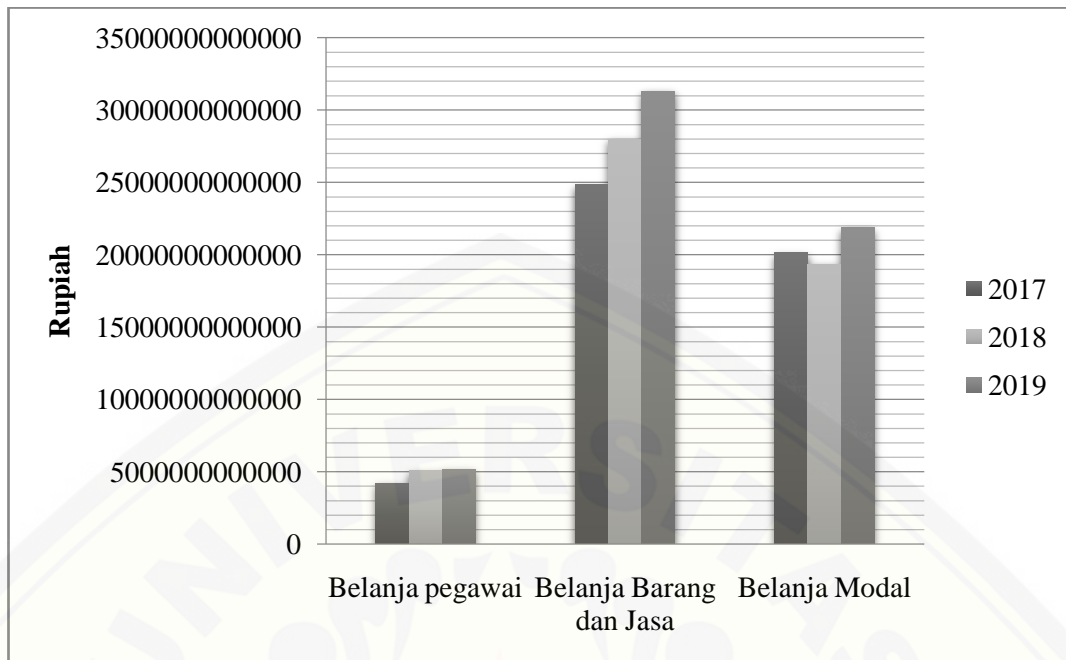
DAU juga memiliki peranan penting dalam memengaruhi belanja modal pada struktur APBD maupun APBD. Beberapa kajian empiris seperti yang dilakukan oleh Marpaung et al (2017) mengkaji pengaruh PAD dan DAU terhadap belanja modal dan dampaknya pada pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Kajian Asnawi dan Ulan (2018) juga menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sementara DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di pulau Jawa. Sementara penelitian dari Sari dan Wirama (2018) menemukan hasil bahwa PAD dan DAK berpengaruh positif pada alokasi belanja modal, sementara DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal di provinsi Bali. Hal serupa ditunjukkan dari hasil penelitian Jati et al, (2019) dalam kajiannya menemukan bahwa DAU tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Sementara PAD dan biaya pekerja memengaruhi belanja modal secara signifikan.

Beberapa komponen yang dapat berpengaruh pada belanja modal suatu daerah antara lain kondisi kinerja keuangan dan komponen PAD dalam struktur APBD. Kinerja keuangan daerah diantaranya dapat ditinjau dari rasio derajat desentralisasi yang menunjukkan derajat kontribusi PAD pada keseluruhan pendapatan daerah (Halim dan Damayanti, 2007). Studi empiris Ersa dan Setiawina (2015) menemukan adanya pengaruh positif signifikan derajat desentralisasi fiskal terhadap pengalokasian belanja modal. Sementara pada studi empiris Suwandi dan Tahar (2015) menemukan hasil yang berbeda, derajat desentralisasi fiskal justru berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Selain rasio desentralisasi fiskal, hal lain yang dapat dilakukan untuk melihat kinerja keuangan dapat melalui rasio kemandirian keuangan daerah. Kinerja keuangan daerah juga dapat diukur dari rasio efektivitas PAD yang menggambarkan

kemampuan dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil suatu daerah (Halim, 2008). Beberapa studi empiris yang dilakukan oleh Gerungan, et al. (2015) dan Hidayat (2013) menemukan bahwa rasio efektivitas memiliki pengaruh positif signifikan pada belanja modal daerah. Sementara itu, Praza (2016) menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan yang terjadi antara rasio efektivitas dengan belanja modal. Kemudian Tamawiwiy, et al (2016) menemukan adanya pengaruh positif namun tidak signifikan rasio efektivitas PAD terhadap belanja modal daerah.

Selain itu, rasio SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) juga menjadi indikator penilaian kinerja keuangan daerah yang dapat memengaruhi belanja modal daerah. Rasio SiLPA ini merupakan perbandingan SiLPA dan total belanja daerah. Belanja modal selain dipengaruhi oleh kinerja keuangan juga dipengaruhi oleh struktur internal APBD itu sendiri yang memiliki potensi dalam kontribusinya terhadap pengembangan dan pembangunan yaitu PAD dan DAU (Dana Alokasi Umum). Komponen DAU ini lebih ditekankan untuk memaksimalkan pemerataan dan meminimalisir adanya kesenjangan.

Suatu daerah memiliki kemampuan dan proporsi berbeda-beda dalam mengalokasikan struktur APBD nya tergantung potensi dan kebutuhan daerah tersebut. Sehingga hal ini dapat memunculkan kesenjangan fiskal antar daerah, dan DAU ini digunakan untuk meminimalisir adanya kesenjangan tersebut. Salah satu wilayah yang memiliki proporsi belanja yang besar dalam struktur APBD adalah Jawa Timur. Aspek pengeluaran yang masih belum dapat mengelola biayanya dengan baik karena sebagian besar dananya digunakan untuk belanja barang dan jasa yang tidak bersifat produktif.



Gambar 1.1 Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur dalam Struktur APBD Tahun 2017-2019
(Sumber: djpk.kemenkeu.go.id, 2020)

Gambar 1.1 menunjukkan pergerakan struktur belanja daerah provinsi Jawa Timur dalam struktur APBD yang didominasi oleh belanja barang dan jasa. Pada kurun waktu 3 tahun terakhir, struktur APBD pada komponen belanja langsung ini mengalami peningkatan pada setiap komponen belanja langsung yang terdiri dari belanja barang dan jasa serta belanja pegawai. Namun, hal berbeda ditunjukkan oleh komponen belanja modal yang cenderung menurun pada tahun 2018 dengan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dari jumlah anggaran belanja modal tahun 2017 sebesar Rp.20.143.262.353.620 menjadi Rp.19.329.948.492.743 kemudian pada tahun 2019, anggaran belanja modal kembali meningkat dengan nilai Rp. 21.846.053.035.476. Potensi pengembangan dan pembangunan di Jawa Timur didukung dengan kondisi sosio demografinya, diperlukan anggaran pada komponen belanja modal yang lebih besar untuk pemenuhan kebutuhan terutama infrastruktur dan sarana prasarana yang dapat meningkatkan aktivitas dan mobilitas ekonomi masyarakat.

Penelitian ini lebih menekankan pada belanja modal karena dalam struktur APBD, belanja modal dapat memberikan manfaat dalam jangka menengah dan

panjang serta dapat menambah aset kekayaan daerah serta pendapatan daerah. Berdasarkan paparan tersebut, maka diperlukan suatu upaya pengalokasian struktur APBD khususnya pada belanja modal di Jawa Timur untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sehingga belanja modal dapat lebih ditingkatkan untuk pemenuhan kebutuhan yang lebih produktif dibandingkan dengan alokasi belanja barang dan jasa. Jika penelitian ini menggunakan beberapa rasio untuk mengukur kinerja keuangan serta komponen struktur APBD seperti DAU dan PAD dalam memengaruhi alokasi belanja daerah, studi Praza (2016) justru hanya menggunakan variabel kinerja keuangan dalam memengaruhi belanja modal di Provinsi Jambi. Studi lain dari Suryantini, et al (2017) menggunakan pengelolaan komponen dari struktur APBD yang terdiri dari PAD, DAU, DAK dalam memengaruhi belanja modal di Provinsi Bali. Penelitian lain yang dilakukan oleh Lucky (2013) dengan menggunakan kapabilitas pembiayaan sebagai proksi dari kinerja keuangan dalam memengaruhi belanja modal.

Penelitian ini menjadi penting dikaji karena berfokus pada pengelolaan keuangan daerah terlebih pada belanja modal yang menjadi salah satu komponen utama anggaran daerah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Pada era otonomi daerah, pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara transparan dan maksimal sesuai kebutuhan daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas daerah dalam mengelola kebutuhannya. Kinerja keuangan daerah menjadi fokus penting untuk menciptakan transparansi, keterbukaan serta mencapai visi misi sesuai tujuan pembangunan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang penelitian ini, dapat ditarik permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah PAD berpengaruh signifikan pada Belanja modal pada Struktur APBD di Jawa Timur ?
2. Apakah DAU berpengaruh signifikan pada Belanja modal pada Struktur APBD di Jawa Timur?

3. Apakah Rasio Desentralisasi Fiskal berpengaruh signifikan pada Belanja modal pada Struktur APBD di Jawa Timur?
4. Apakah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh signifikan pada Belanja modal pada Struktur APBD di Jawa Timur?
5. Apakah Rasio Efektivitas PAD berpengaruh signifikan pada Belanja modal pada Struktur APBD di Jawa Timur?
6. Apakah Rasio Efisiensi Keuangan berpengaruh signifikan pada Belanja modal pada Struktur APBD di Jawa Timur?
7. Apakah Rasio Pembiayaan SiLPA berpengaruh signifikan pada Belanja modal pada Struktur APBD di Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan pada Subbab 1.2, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah PAD berpengaruh signifikan pada Belanja modal pada Struktur APBD di Jawa Timur.
2. Untuk menguji dan menganalisis apakah DAU berpengaruh signifikan pada Belanja modal pada Struktur APBD di Jawa Timur.
3. Untuk menguji dan menganalisis apakah Rasio Desentralisasi Fiskal berpengaruh signifikan pada Belanja modal pada Struktur APBD di Jawa Timur.
4. Untuk menguji dan menganalisis apakah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh signifikan pada Belanja modal pada Struktur APBD di Jawa Timur.
5. Untuk menguji dan menganalisis apakah Rasio Efektivitas PAD berpengaruh signifikan pada Belanja modal pada Struktur APBD di Jawa Timur.
6. Untuk menguji dan menganalisis apakah Rasio Efisiensi Keuangan berpengaruh signifikan pada Belanja modal pada Struktur APBD di Jawa Timur.
7. Untuk menguji dan menganalisis apakah Rasio Pembiayaan SiLPA berpengaruh signifikan pada Belanja modal pada Struktur APBD di Jawa Timur..

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Menambah literatur terkait kinerja keuangan daerah dan alokasi pengelolaan keuangan terlebih pada komponen belanja modal dalam meningkatkan pembangunan suatu daerah.

2. Secara Empiris

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai referensi penelitian selanjutnya untuk dikembangkan lebih lanjut terkait dengan analisis keuangan daerah khususnya pada belanja modal daerah.

3. Secara Praktis

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para pengambil kebijakan dan penyusun anggaran APBD.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab 2 merupakan pembahasan terkait kajian pustaka yang terdiri dari landasan teori yang dijelaskan pada subbab 2.1, selanjutnya pada subbab 2.2 menjelaskan landasan empiris yang terdiri dari penelitian sebelumnya yang menjadi acuan dari penelitian ini. Pada subbab 2.3 memaparkan kerangka konseptual dari penelitian ini dan selanjutnya pada bab 2.4 menjelaskan hipotesis penelitian.

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 Teori Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi Fiskal menjadi salah satu bagian dari agenda "reformasi" di seluruh dunia, yang didukung oleh Bank Dunia, USAID, Bank Pembangunan Asia, dan banyak lainnya, dan telah menjadi bagian integral dari pengembangan ekonomi dan strategi tata kelola di negara-negara berkembang dan transisi (Bahl, 1999; Kee, 2004). Definisi desentralisasi fiskal oleh James Edwen Kee (2004) adalah pelimpahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (negara bagian, daerah, kota) dari fungsi-fungsi tertentu dengan otoritas administratif dan pendapatan fiskal untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut.

Pengertian secara teoritis untuk desentralisasi fiskal berasal dari para filsuf abad 17 dan 18, termasuk Rousseau, Mill, de Tocqueville, Montesquieu dan Madison. Desentralisasi fiskal adalah salah satu konsep kunci dalam teori keuangan publik dan digunakan dalam reformasi sektor publik. Di negara-negara federal, desentralisasi fiskal berarti bahwa tanggung jawab pendapatan dan pengeluaran (hak untuk mengenakan dan memungut pajak dan secara mandiri menentukan area fokus pengeluaran) ditransfer dari tingkat federal ke tingkat regional dan lokal (Kee 2004; Oates 2006; Suryantin, Darmayanti, and Candraningrat 2018; Tiebout 1961).

Argumen kunci yang mendukung desentralisasi fiskal adalah kemungkinan untuk meningkatkan efisiensi alokasi dan produktif dari penyediaan barang publik

(Oates, 1999; Martinez-Vazquez dan McNab, 2003). Efisiensi alokatif dari ketentuan yang terdesentralisasi dari sebagian besar layanan publik lebih tinggi daripada ketentuan yang tersentralisasi karena tingkat pemerintahan yang lebih rendah dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui kepuasan yang lebih komprehensif dari kebutuhan individu mereka. Efisiensi produktif juga dapat lebih tinggi di bawah desentralisasi karena otoritas subnasional, yang memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang kebutuhan dan pengalaman warga dalam menyediakan masing-masing barang publik, dapat memproduksi barang-barang tersebut dengan biaya lebih rendah (Martinez-Vazquez 2011; Yushkov 2016).

Keuntungan lain dari desentralisasi fiskal adalah dengan lembaga-lembaga demokratis yang kuat (pemilihan yang transparan, supremasi hukum, dan sistem parlementer yang efektif) desentralisasi fiskal dapat mendorong akuntabilitas yang lebih tinggi dari otoritas daerah dan peningkatan kualitas tata kelola (Martinez-Vazquez 2011; Oates 2006). Sebaliknya, desentralisasi fiskal dapat berbahaya dalam keadaan tertentu (Prud'homme, 1995). Desentralisasi yang berlebihan membuat stabilitas makroekonomi dan redistribusi pendapatan hampir tidak dapat dicapai. Pada masa krisis, stabilisasi makroekonomi menjadi bermasalah karena pemerintah federal tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menstabilkan perekonomian, sedangkan pemerintah daerah yang kuat mungkin memiliki prioritas kebijakan fiskal yang berbeda, seringkali kontradiktif (Prud'homme, 1995; Oates, 2006; Martinez-Vazquez, 2011; Yushkov, 2016). Redistribusi pendapatan juga tidak berfungsi di bawah desentralisasi penuh. Sumber daya biasanya didistribusikan secara tidak merata di antara wilayah (setidaknya di negara bagian besar federal). Oleh karena itu, kurangnya kebijakan penyetaraan terpusat dapat menyebabkan kebangkrutan daerah miskin. Persaingan fiskal horizontal yang berlebihan dapat menyebabkan ketimpangan yang lebih besar antara daerah dan ketidakseimbangan fiskal horizontal (Chariri et al. 2019; Martinez-Vazquez 2011). Selain itu, kualitas tata kelola dipertanyakan di tingkat regional dan lokal di negara-negara tertentu (kompetensi pejabat yang rendah, korupsi, dan lembaga yang lemah); oleh karena itu, patut dipertanyakan apakah otoritas subnasional dapat mencapai efisiensi tinggi dalam produksi publik (Kee

2004; Martinez-Vazquez 2011; Tirtosuharto 2017). Masalah lain dari desentralisasi adalah ketidakmampuan pemerintah daerah untuk sepenuhnya menginternalisasi eksternalitas lintas-daerah, yang menimbulkan keraguan mengenai kesimpulan teoritis yang ditemukan dalam studi klasik federalisme fiskal (Oates, 1972).

Desentralisasi fiskal didefinisikan sebagai mekanisme pengeluaran dan alokasi pendapatan dalam suatu sistem keuangan antar pemerintah yang menjamin penyampaian layanan publik yang efisien (Tiebout 1961; Tirtosuharto 2017; Yushkov 2016), sedangkan tingkat desentralisasi fiskal, yang biasanya digunakan untuk mengukur tingkat desentralisasi, didefinisikan sebagai bagian dari pengeluaran / pendapatan subnasional dibandingkan total pengeluaran / pendapatan pemerintah (Woller dan Phillips 1998; Ebel dan Yilmaz 2003). Berdasarkan premis efisiensi alokatif, desentralisasi fiskal berpotensi mendukung efisiensi dalam ekonomi lokal dan juga mendorong kompetisi antar pemerintah (Bardhan 2002). Ini menyiratkan bahwa pemerintah daerah harus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya fiskal yang terbatas untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran yang berlebihan atau ketidaksesuaian dalam penugasan pengeluaran dapat merusak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah (Davoodi dan Zou 1998; Devarajan et al. 1996).

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berkaitan dengan otonomi daerah yaitu pada UU No 22 tahun 1999 dan UU no. 25 tahun 1999, desentralisasi dalam masalah anggaran terutama berlaku untuk sisi pengeluaran. Hal tersebut tidak berlaku pada sisi fiskal atau peningkatan pendapatan sehingga tidak ada peningkatan kapasitas pemerintah daerah untuk pajak penghasilan atau aset. Oleh karena itu, meskipun daerah sekarang memiliki wewenang untuk memutuskan bagaimana mengalokasikan anggaran, namun daerah tidak diberi wewenang untuk meningkatkan pendapatan. Akibatnya, daerah masih sangat tergantung pada transfer dari pemerintah pusat untuk mereka. Namun, UU tersebut telah diperbaharui yaitu menjadi UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah Bagian kelima tentang Pendapatan, Belanja dan

pembiayaan Pasal 285 yang menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas :

1. pendapatan asli Daerah meliputi:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
2. pendapatan transfer; dan
3. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang

Hal lain yang dominan di antara peran pemerintah daerah dalam sistem desentralisasi adalah tanggung jawab dan kemampuan dalam mengelola sumber daya fiskal. Desentralisasi fiskal telah mengalihkan tanggung jawab fiskal kepada pemerintah daerah berdasarkan pada premis bahwa pemerintah daerah lebih efisien dalam mengalokasikan sumber daya fiskal daripada pemerintah pusat karena hubungan yang lebih dekat dengan konstituen lokal (Bird & Wallich, 1993; Oates, 1993). Namun, karena perbedaan dalam lanskap politik dan sosial ekonomi antar daerah, insentif fiskal bersih dari pelaksanaan desentralisasi fiskal berbeda dari satu daerah ke daerah lain. Akibatnya, dampak desentralisasi fiskal pada pertumbuhan daerah juga bervariasi dan oleh karena itu penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor penentu yang mempengaruhi efisiensi fiskal di tingkat pemerintah daerah agar dapat fokus pada kebijakan spesifik (Tirtosuharto, 2017; Yushkov, 2016)

2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan pada UU No 34 tahun 2014 menyebutkan bahwa Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari

pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Penetapan kebijakan DAU dilakukan dengan cara menghitung luas lautan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut. DAU bagi Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan yang diperoleh dari penghitungan luas wilayah lautan termasuk untuk Daerah kabupaten/kota dalam Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan dengan proporsi 30 % (tiga puluh persen) untuk Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan dan 70 % (tujuh puluh persen) untuk Daerah kabupaten/kota dalam Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan tersebut.

Tujuan adanya alokasi DAU berdasarkan Pasal 290 UU No 23 tahun 2014 yaitu pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. DAU suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal. Celah fiskal merupakan kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal Daerah. kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan tidak terkait pelayanan dasar maupun urusan pemerintahan.

Dana Alokasi Umum pada penelitian ini didasari dari teori federalisme yang mengarah pada pengelolaan dana perimbangan. Teori Federalisme fiskal didasari oleh tiga teori yang dikemukakan oleh Pigou yaitu teori fungsi pemerintah, teori kegagalan pasar, dan teori perencanaan sosial yang kemudian dikembangkan oleh beberapa ekonom yaitu Arrow, Musgrave, dan Samuelson (Weingast, 2014). Teori federalisme fiskal mengemukakan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, karena adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke tingkat pemerintahan dibawahnya yang mana masing-masing tingkatan pemerintah memiliki tanggung jawab dan sumber pendapatannya masing-masing sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing tingkatan pemerintah (Ebel, 2014). Oleh karena itu, dalam teori federalisme fiskal konsep pelaksanaan pemerintah daerah dituntut untuk membiayai sendiri penyediaan barang publik dan pembangunan daerahnya,

akantetapi sumber pendapatan daerah tidak mencukupi untuk membiayai pembangunan daerahnya secara mandiri, oleh karena itu muncul adanya transfer dari pemerintah pusat atau lebih dikenal dengan dana perimbangan (Weingast, 2014).

2.1.3 Belanja Modal

Otonomi daerah dipandang sebagai salah satu perubahan signifikan yang dihasilkan dari reformasi sektor publik. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (kemudian direvisi oleh UU No. 32 tahun 2004 dan selanjutnya direvisi kembali menjadi UU No 23 tahun 2014) mengatur otonomi daerah yang memberi pemerintah daerah kewenangan yang jauh lebih besar untuk mengelola daerahnya sendiri dengan sedikit bantuan dari pemerintah pusat. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk menggunakan sumber daya keuangan mereka untuk menentukan alokasi sumber daya untuk pengeluaran daerah; dengan berpegang pada prinsip-prinsip kepatuhan, kebutuhan, dan kemampuan lokal serta aspirasi masyarakat yang tercantum dalam anggaran pemerintah daerah (Chariri, Diponegoro, Jatmiko, Prabowo, & Diponegoro, 2019; Kuntari, Diponegoro, et al., 2019).

Pada Pasal 1 UU 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 298 bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal dan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyediaan sumber daya keuangan negara untuk pemerintah daerah dalam konteks pelaksanaan desentralisasi didasarkan pada penyerahan tugas oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan mempertimbangkan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Dana perimbangan adalah perwujudan dari konsep transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah di Indonesia. Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus

(DAK) dan Dana Bagi Hasil (Dana Bagi Hasil; DBH). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah cerminan dari kegiatan pemerintah daerah dan alokasi sumber daya yang digunakannya. Pemerintah daerah akan memilih prioritas kegiatan dan mengalokasikan dana untuk kegiatan tersebut. Kegiatan yang dipilih menyiratkan kebijakan pemerintah daerah dalam mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat.

Revisi UU memberikan implikasi untuk perubahan dalam sistem pengambilan keputusan alokasi sumber daya dalam anggaran pemerintah daerah. Di era sebelumnya, penentuan jumlah alokasi mengacu pada realisasi anggaran tahun sebelumnya dengan menambahkan sedikit peningkatan (inkremental) tanpa perubahan jenis baris / item baris (Smith, 2008; Usman, 2002). Penganggaran semacam itu disebut item baris dan penganggaran bertahap. Otonomi daerah membuat perubahan anggaran pemerintah daerah menjadi anggaran berbasis kinerja.

Anggaran belanja modal menggambarkan kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan daerah. Anggaran daerah adalah rencana untuk kegiatan pemerintah daerah dan alokasi sumber daya. Alokasi anggaran daerah menunjukkan kebijakan pemerintah daerah dalam pembiayaan pembangunan. Anggaran sektor publik adalah rencana kegiatan, yang diwujudkan dalam bentuk rencana peningkatan pendapatan dan alokasi pengeluaran dalam satuan moneter (Gomes, Alfinito, & Albuquerque, 2013; Jacobs, 2009). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh Majelis di Daerah dan ditentukan oleh peraturan daerah. APBD adalah dasar dari manajemen keuangan lokal yang merupakan panduan bagi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam satu tahun fiskal.

Konsep dari belanja modal berkaitan dengan teori dari desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal didefinisikan sebagai mekanisme pengeluaran dan alokasi pendapatan dalam suatu sistem keuangan antar pemerintah yang menjamin penyampaian layanan publik yang efisien (Tiebout, 1961; Tirtosuharto, 2017; Yushkov, 2016), sedangkan tingkat desentralisasi fiskal, yang biasanya digunakan

untuk mengukur tingkat desentralisasi, didefinisikan sebagai bagian dari pengeluaran / pendapatan subnasional dibandingkan total pengeluaran / pendapatan pemerintah (Badrudin, 2011; Kee, 2004; Oates, 1993) . Berdasarkan premis efisiensi alokatif, desentralisasi fiskal berpotensi mendukung efisiensi dalam ekonomi lokal dan juga mendorong kompetisi antar pemerintah (Bird & Wallich, 1993; Davoodi & Zou, 1998). Ini menyiratkan bahwa pemerintah daerah harus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya fiskal yang terbatas untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran yang berlebihan atau ketidaksesuaian dalam penugasan pengeluaran dapat merusak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah (Davoodi & Zou, 1998; Devarajan, Swaroop, & Zou, 1996)

Selain itu juga terdapat keterkaitan antara teori federalisme dengan pengeluaran belanja modal yaitu keterbatasan pendapatan yang diperoleh oleh masing-masing daerah membuat tanggung jawab yang dilakukan oleh daerah tersebut tidak maksimal, sehingga terdapat dana transfer dari pemerintah pusat sebagai salah satu sumber penerimaan daerah baik dalam bentuk dana transfer umum maupun dana transfer khusus. Dengan adanya dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat, tanggung jawab yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah akan lebih besar karena kemampuan keuangan pemerintah daerah lebih besar (Kappeler & Vällilä, 2008). Oleh karena itu, perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan yang dapat dilakukan oleh pemerintah akan lebih besar. Hal ini mencerminkan bahwa dengan adanya dana transfer dari pemerintah pusat belanja modal yang dapat dialokasikan oleh pemerintah daerah akan lebih besar.

2.1.4 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Teori besar yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kesejahteraan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebahagiaan (kesejahteraan) terbesar dari jumlah terbesar warga negara mereka. Kebahagiaan atau kesejahteraan atau apa yang disebut utilitas dapat dicapai melalui reformasi hukum, peran konstitusi dan studi sosial untuk pengembangan kebijakan

social (Badrudin, 2011; Chariri et al., 2019; Martinez-Vazquez, 2011). Kinerja keuangan adalah tingkat pencapaian target untuk keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan indikator keuangan yang dapat dinilai dari pertanggungjawaban Anggaran Daerah (APBD) (Halim, 2004).

Pemerintah daerah diharapkan untuk mengembangkan sistem manajemen keuangan yang efektif untuk memastikan penggunaan sumber daya moneter yang efisien dan efektif sedemikian rupa untuk mencapai tujuan kelembagaan dan keberlanjutan keuangan. Tujuan di sektor publik adalah untuk mencegah pemborosan keuangan (misalnya Pengeluaran berlebihan, persistensi saldo kas negatif) dan pengeluaran yang dapat dihindari lainnya (sia-sia dan boros serta pengeluaran tidak teratur) ketika menyediakan barang dan layanan publik kepada warga negara (Gomes et al., 2013; Jacobs, 2009; Mamogale, 2014). Karena ada permintaan tinggi untuk akuntabilitas keuangan dalam layanan sipil lokal melalui Pemerintah Daerah: Undang-Undang Manajemen Keuangan pemerintah daerah diharapkan menjaga semua pembayaran dan piutang transparan. Oleh karena itu, kinerja keuangan adalah proses pengukuran hasil kebijakan dan operasi lembaga dalam hal moneter. Di pemerintah daerah proses audit digunakan sebagai alat untuk mengukur kesehatan keuangan kota secara keseluruhan selama periode waktu tertentu. Proses audit selanjutnya digunakan untuk membandingkan kota-kota serupa di seluruh sistem pemerintah daerah atau untuk membandingkan sektor secara agregat berkaitan dengan manajemen keuangan dan penyediaan barang publik.

Peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan yaitu mengacu pada beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
3. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Penyempurnaan peraturan yang telah dilakukan pemerintah sebagai dasar untuk menjaga pengelolaan keuangan daerah yang baik berlandaskan pada tiga pilar tata pengelolaan keuangan daerah yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Selain itu juga terdapat Keterkaitan antara teori federalisme fiskal dengan kinerja keuangan pemerintah yaitu dengan adanya persaingan pembangunan ekonomi dan kesenjangan pembangunan masing-masing daerah, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki akuntabilitas yang baik dalam pengelolaan anggaran yang terbatas maupun dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan akuntabilitas pemerintah yang baik, diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat lebih maksimal dan tanpa adanya penyimpangan dalam manajemen anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Kinerja keuangan yang dihubungkan dengan belanja modal dapat dijelaskan dari teori agensi. Dalam hal ini, pemerintah daerah yang bertindak sebagai pemegang peran penuh dalam menyikapi, alokasi, realisasi serta pelaporan anggaran sesuai kebutuhan masyarakat. Alokasi anggaran ini didasarkan pada kebutuhan dan potensi kekayaan yang ada pada suatu daerah tersebut. Untuk mencapai hal itu, perlu sinkronisasi yang baik antara pemangku kebijakan beserta pengelola atau pelaksana. Realisasi pengeluaran modal dan

penggalan sumber daya keuangan yang mungkin mempengaruhi jumlah realisasi anggaran daerah akan memainkan peran penting dalam menunjukkan akuntabilitas manajemen dan penggunaan keuangan lokal, yang juga merupakan sumber keuangan publik. Oleh sebab itu, pemerintah dituntut untuk lebih bertanggung jawab dalam pengalokasian dan realisasi untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pelaporan anggaran juga penting dilakukan untuk menunjukkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah dalam melaksanakan amanah dan tugasnya (Praza, 2016a; Suwandi & Tahar, 2015; Tuasikal, 2008).

Hubungan agensi ini pada akhirnya akan memengaruhi perkembangan kerjasama dan pengembangan hubungan antara pengelola dan pemangku kebijakan sehingga dapat berdampak pada suatu capaian kinerja (Robson & Kant, 2007). Pengelolaan keuangan dalam anggaran daerah yang dilakukan dengan kestabilan hubungan agensi tanpa adanya konflik kepentingan individu, maka dapat tercapai tujuan yang diharapkan. Dalam proses pengelolaan organisasi terlebih masalah pengelolaan anggaran dalam rumah tangga pemerintah daerah, diperlukan dukungan lembaga berupa komitmen yang jelas sehingga keberhasilan pengelolaan keuangan tersebut. Dalam hal ini, masyarakat juga memiliki andil besar agar anggaran dapat dilaksanakan sesuai sasaran. Pola pikir masyarakat yang bertindak sebagai objek kebijakan juga harus berada dalam satu tujuan dengan pemangku kebijakan dan pelaksana.

Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu sebagai berikut (D. Indiyanti & Rahyuda, 2018; Praza, 2016a):

1. Rasio derajat desentralisasi fiskal

Desentralisasi Fiskal menjadi salah satu bagian dari agenda "reformasi" di seluruh dunia, yang didukung oleh Bank Dunia, USAID, Bank Pembangunan Asia, dan banyak lainnya, dan telah menjadi bagian integral dari pengembangan ekonomi dan strategi tata kelola di negara-negara berkembang dan transisi (Bahl, 1999; Kee, 2004). Definisi desentralisasi fiskal oleh James Edwen Kee (2004) adalah pelimpahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (negara

bagian, daerah, kota) dari fungsi-fungsi tertentu dengan otoritas administratif dan pendapatan fiskal untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut.

Desentralisasi fiskal adalah salah satu konsep kunci dalam teori keuangan publik dan digunakan dalam reformasi sektor publik. Di negara-negara federal, desentralisasi fiskal berarti bahwa tanggung jawab pendapatan dan pengeluaran (hak untuk menggunakan dan memungut pajak dan secara mandiri menentukan area fokus pengeluaran) ditransfer dari tingkat federal ke tingkat regional dan lokal (Kee, 2004; Oates, 2006; Suryantin, Darmayanti, & Candraninggrat, 2018; Tiebout, 1961). Salah satu proksi dari kinerja keuangan dalam penelitian ini yaitu rasio derajat desentralisasi fiskal yang merupakan perbandingan antara pendapatan asli daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah. Rasio derajat desentralisasi dapat diformulasikan sebagai berikut.

$$\text{rasio derajat desentralisasi} = \frac{\text{PAD}}{\text{total pendapatan daerah}} \times 100\% \quad (2.1)$$

Tabel 2.1. Tabel Penilaian Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Prosentase PAD Terhadap TPD	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0.00-10.00	Sangat kurang
10.01-20.00	Kurang
20.01-30.00	Sedang
30.01-40.00	Cukup
40.01-50.00	Baik
≥50.01	Sangat baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri (dalam Bisma, 2010)

2. Rasio kemandirian keuangan daerah

Kemandirian keuangan daerah merupakan bentuk keberhasilan dari kebijakan otonomi daerah. Hal ini berkaitan dengan kemampuan daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah dalam bentuk PAD melalui pembangunan dan pengembangan sumber daya alam yang dimiliki daerah. Kontrol pemerintah daerah terhadap pendapatan mereka diimbangi dengan otonomi mereka dalam membuat keputusan untuk belanja daerah. Kemandirian keuangan lokal bertujuan untuk menggambarkan ketergantungan daerah pada sumber pendanaan eksternal

dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (Fafurida & Pratiwi, 2017). Rasio kemandirian finansial digunakan untuk menentukan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pengembangan, dan layanan kepada orang-orang yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang disyaratkan.

Rasio kemandirian keuangan daerah merupakan perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan transfer pusat, provinsi dan pinjaman. Dengan demikian, formulasinya sebagai berikut

$$\text{rasio kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{transfer pusat} + \text{provinsi} + \text{pinjaman}} \times 100\% \quad (2.2.)$$

Dana transfer umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran untuk daerah dan digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam konteks pelaksanaan desentralisasi (Martini, Sari, Somadi, & Karman, 2019). Ketika rasio kemandirian finansial semakin jauh dari poin 0, kawasan semakin mandiri, dan sebaliknya. Ada beberapa strategi untuk meningkatkan kemandirian finansial: membuat kebijakan intensifikasi dan perluasan PAD, menciptakan kondisi dan situasi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, mencapai efektivitas dan efisiensi perusahaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan teknologi, dan meminimalkan elemen utang dalam keuangan daerah.

Tabel 2.2. Pola Hubungan Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah sekali	0-25	Instruktif
Rendah	25-50	Konsultatif
Sedang	50-75	Partisipatif
tinggi	75-100	Delegatif

Sumber : Halim (2004)

- a. Pola Hubungan Instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. (Daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- b. Pola Hubungan Konsultatif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- c. Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
- d. Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

3. Rasio efektivitas pendapatan asli daerah

Rasio efektivitas PAD merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah. Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diukur dengan perbandingan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Formulasi rasio efektivitas sebagai berikut

$$\text{rasio efektivitas} = \frac{\text{realisasi penerimaan PAD}}{\text{target penerimaan PAD}} \times 100\% \quad (2.3)$$

Kriteria penilaian dalam mengukur tingkat efektivitas PAD dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.3. Kriteria Penilaian Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Prosentase Kinerja Keuangan	Kriteria Efektivitas
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90-99%	Cukup Efektif
75-89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber Mahmudi (2010)

4. Rasio efisiensi keuangan

Rasio Efisiensi Keuangan merupakan rasio yang menjelaskan tentang efisiensi penggunaan keuangan. Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi semakin tinggi kinerja keuangan daerah maka semakin banyak infrastruktur dan fasilitas dibangun yang berarti belanja modal yang optimal dari pemerintah daerah. Rasio efisiensi keuangan diperoleh dari membandingkan realisasi belanja modal dengan total realisasi penerimaan pendapatan. Dengan demikian, formulasinya sebagai berikut

$$rasio\ efisiensi = \frac{Realisasi\ Belanja\ Modal}{realisasi\ penerimaan\ pendapatan} \times 100\% \quad (2.4)$$

Tabel 2.4. Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah

Nilai	Kriteria Efisiensi
>100%	Tidak Efektif
91% - 100%	Kurang Efisien
81% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

Sumber: Abdul Halim (2007)

5. Rasio pembiayaan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA)

Belanja modal memiliki keterkaitan dengan SiLPA yang merupakan indikator efisiensi yang hanya dibentuk jika terdapat surplus dalam anggaran dan pada saat yang sama terjadi pembiayaan bersih di mana komponen penerimaan lebih besar daripada komponen pengeluaran pembiayaan (Armawaddin & Ahmad, 2019; Fahlevi, 2017; Korompot & Warongan, 2017b). Dengan kata lain bahwa SiLPA adalah indikator yang menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah. Rasio pembiayaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dapat diukur dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dengan total belanja. Tingginya rasio pembiayaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menggambarkan tingginya

dana alokasi belanja modal yang dapat diserap. Rasio pembiayaan SiLPA dapat diformulasikan sebagai berikut.

$$\text{rasio pembiayaan SiLPA} = \frac{\text{SiLPA}}{\text{total belanja}} \times 100\% \quad (2.5)$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian yang membahas tentang keuangan daerah khususnya belanja modal pemerintah daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah telah banyak dilakukan. Salah satu penelitian tersebut dilakukan oleh (Suryantin et al., 2018) yang membahas tentang pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap belanja modal daerah dan pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada penelitian tersebut, (Suryantin et al., 2018) ingin menganalisis tiga hal yaitu pengaruh kinerja keuangan pemerintah terhadap belanja modal pemerintah daerah, pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, dan pengaruh belanja modal pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali pada kurun waktu 2012-2016. Obyek penelitian yang digunakan oleh (Suryantin et al., 2018) yaitu seluruh kabupaten atau kota di provinsi bali. Kemudian sesuai dengan tujuan dari penelitiannya (Suryantin et al., 2018) menggunakan alat metode yaitu SEM (*Structural Equation Model*) dengan alat analisis PLS Program untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel yang digunakan.

Suryantini et al., (2018) menggunakan 5 rasio keuangan sebagai proxy dari variabel kinerja keuangan pemerintah yaitu Rasio Independensi, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas, dan Rasio Pertumbuhan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Bali memiliki hubungan keterpengaruhan yang signifikan terhadap belanja modal. Kemudian hubungan keterpengaruhan antara variabel kinerja keuangan pemerintah dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Sebaliknya, hubungan keterpengaruhan antara variabel belanja modal dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil hubungan yang signifikan.

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Indiyanti dan Rahyuda, (2018). Pada penelitian tersebut Indrayanti dan Rahyuda (2018) ingin mengetahui pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal. Periode waktu penelitian ini yaitu tahun 2012-2016 dengan objek penelitian seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bali. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Indrayanti dan Rahyuda (2018) dengan penelitian Suryantini *et al.* (2019) terletak pada penggunaan proxy pada variabel kinerja keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Indrayanti dan Rahyuda (2018) menggunakan variabel Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Tingkat Pembiayaan SILPA, derajat kontribusi BUMD, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi keuangan daerah.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian Indrayanti dan Rahyuda (2018) yaitu PLS (*Panel Least Square*). Hasil penelitian Indrayanti dan Rahyuda (2018) menunjukkan bahwa tidak sepenuhnya rasio pengukuran kinerja keuangan pemerintah memiliki hubungan keterpengaruh yang positif dan signifikan. Variabel yang memiliki hubungan yang positif dan signifikan yaitu variabel Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Tingkat Pembiayaan SILPA, derajat kontribusi BUMD. Sedangkan variabel Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi keuangan daerah memiliki hubungan keterpengaruh yang negatif tidak signifikan.

Pembahasan yang sama juga dilakukan oleh Praza (2016) yang meneliti tentang pengaruh kinerja keuangan pemerintah terhadap alokasi belanja modal di Provinsi Jambi. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 2010-2013 dengan data panel di sembilan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu FEM (*Fixed Effect Model*) dengan variabel belanja modal dan kinerja keuangan pemerintah yang di proxy dengan data Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan, Rasio kemandirian, Rasio Derajat Kontribusi BUMD, dan Rasio Efektivitas PAD. Hasil penelitian Praza (2016) menunjukkan bahwa secara umum kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi masih tergolong rendah, meski demikian hasil analisis dengan metode PLS menunjukkan bahwa variabel kinerja keuangan

pemerintah secara simultan memiliki hubungan yang signifikan terhadap alokasi belanja modal. Kemudian jika dilihat dari masing-masing variabel dapat dilihat bahwa variabel Rasio Derajat Desentralisasi memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal daerah. Sedangkan variabel, sedangkan variabel Rasio Ketergantungan, Rasio kemandirian, dan Rasio Derajat Kontribusi BUMD memiliki hubungan yang negatif namun tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal, dan variabel Efektivitas PAD tidak memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Berbeda dengan tiga penelitian sebelumnya, Kuntari *et al.* (2019) meneliti tentang determinasi belanja modal di 35 pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 2014-2016. Pada penelitiannya Kuntari *et al.* (2019) ingin mengetahui faktor faktor yang memengaruhi belanja modal pemerintah, adapun variabel-variabel yang digunakan oleh Kuntari *et al.* (2019) yaitu variabel PAD (pendapatan Asli Daerah), DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus), dan dana bagi hasil. Metode analisis yang digunakan dalam menganalisis data penelitian yaitu metode Regresi sederhana, sedangkan data yang digunakan untuk melakukan analisis yaitu data panel. Dari hasil analisis yang dilakukan oleh Kuntari *et al.* (2019) menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yang digunakan yaitu variabel PAD, DAU, DAK, dan dana bagi hasil memiliki pengaruh yang positif terhadap belanja modal di 35 pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian yang menganalisis determinan dari belanja modal juga dilakukan oleh Sugiyanta (2016) yang menganalisis tentang belanja modal dan faktor-faktor yang memengaruhinya pada tahun 2011-2013 di seluruh pemerintah Daerah di Indonesia. Dalam penelitian tersebut Sugiyanta (2016) memasukkan Variabel PAD (Pendapatan Asli Daerah), DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus), Dana Bagi Hasil, dan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) sebagai variabel yang dapat memengaruhi belanja modal pemerintah daerah di Indonesia. Analisis data dalam penelitian Sugiyanta (2016) dilakukan dengan menggunakan metode Regresi linier berganda pada data Panel atau (Panel Least Square / PLS). Hasil analisis dengan menggunakan metode PLS

menunjukkan bahwa hanya terdapat dua variabel yang memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal yaitu variabel DAK dan variabel SILPA. Kemudian variabel lainnya yaitu PAD, DAU, dan Dana bagi hasil memiliki dampak negatif terhadap belanja modal.

Analisis tentang belanja modal juga dilakukan oleh Sholihah dan Wahyudi (2014). Sholihah dan Wahyudi (2014) melakukan analisis tentang ada atau tidaknya hubungan antara variabel alokasi belanja modal pemerintah daerah di pulau Jawa dengan variabel PAD (Pendapatan Asli Daerah), Dana Bagi Hasil, DAU (Dana Alokasi Umum), dan luas Wilayah. Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2010 dengan objek penelitian 93 pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa, hal ini menunjukkan bahwa data yang digunakan oleh Sholihah dan Wahyudi (2014) yaitu data Cross Section. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis linier berganda. Hasil analisis dari regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel PAD, Dana Bagi Hasil, dan luas daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal di Pulau Jawa. Kemudian variabel DAU menunjukkan hasil yang berbeda yaitu tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal di Pulau Jawa.

Penelitian yang dilakukan oleh Rochmatullah *et al.* (2016) berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti tentang determinasi dari nilai belanja modal pemerintah. Pada penelitian yang dilakukan oleh Rachmatullah *et al.* (2016) ingin mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi nilai belanja modal pemerintah daerah, namun yang menjadi pembeda dari penelitian sebelumnya yaitu variabel-variabel dependen yang digunakan dalam penelitian. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian Rachmatullah *et al.* (2016) tidak hanya memasukan variabel keuangan daerah seperti PAD (Pendapatan Asli Daerah), DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus), dan Ketergantungan Fiskal, tetapi juga memasukan variabel non keuangan seperti cakupan wilayah, jenis pemerintahan yang diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota, serta lokasi pemerintahan yang juga diklasifikasikan kedalam dua kelompok yaitu di pulau jawa dan diluar pulau jawa.

Penelitian yang hampir serupa juga dilakukan oleh Indramawan (2018) yang meneliti tentang dampak kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Papua Barat. Dalam penelitiannya Indramawan (2018) menganalisis tentang dampak kinerja keuangan pemerintah daerah yang di proxy dengan rasio ketergantungan daerah, rasio Efektivitas penerimaan daerah, dan rasio desentralisasi fiskal, serta rasio pengeluaran modal terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Papua Barat. Dalam penelitian ini, Indramawan (2018) memasukkan indeks pembangunan manusia sebagai pengukuran tingkat pembangunan daerah yang mana hal tersebut juga dapat mencerminkan tingkat pengeluaran pemerintah sebelumnya pada sektor modal terkait dengan pendidikan, kesehatan dan juga infrastruktur daerah. Penelitian Indramawan (2018) menggunakan data panel tahunan dengan series 6 tahun (2011 - 2016) dan 6 cross-section yaitu 6 kabupaten di wilayah provinsi Papua Barat, adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis regresi data panel yaitu *Fix Effect model*. Hasil penelitian Indramawan (2018) menunjukkan bahwa rasio desentralisasi fiskal memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat, sedangkan rasio ketergantungan keuangan pemerintah daerah dan rasio belanja modal memiliki dampak yang negatif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia sedangkan variabel rasio Efektivitas pendapatan asli daerah berdampak negatif namun tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat.

Penelitian yang dilakukan oleh (Korompot & Warongan, 2017a) juga meneliti tentang kinerja keuangan pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang diukur dengan Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Desentralisasi, Rasio Harmoni, dan Rasio Pertumbuhan dalam kurun waktu 2010-2015. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan empiris yang digunakan dalam penelitiannya yaitu metode penelitian deskriptif dengan mendeskripsikan hasil perhitungan rasio kinerja keuangan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Komporot & Warongan, 2017) menunjukkan bahwa rasio kemandirian pemerintah provinsi Sulawesi Utara

termasuk dalam kategori partisipatif yang artinya ketergantungan pemerintah provinsi terhadap pembiayaan dari pihak luar telah mengalami penurunan dan pendapatan daerahnya terus mengalami peningkatan, kemudian rasio Efektivitas pendapatan domestik juga mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2014 dan 2015 yang mengalami penurunan. Kemudian dari rasio derajat desentralisasi menunjukkan bahwa pemerintah provinsi Sulawesi Utara masih belum dapat sepenuhnya dapat membiayai pengeluarannya dengan Pendapatan Asli Daerahnya yang artinya pemerintah Provinsi masih bergantung dengan dana perimbangan dari pemerintah pusat. Kemudian dari Rasio Harmony menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan pengeluaran pemerintah provinsi masih digunakan untuk kegiatan belanja operasional, sedangkan hanya sebagian kecil dari kegiatan pengeluarannya digunakan untuk pengeluaran modal. Kemudian untuk rasio pertumbuhannya menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2010-2015 pertumbuhan yang terjadi tidak stabil.

Penelitian yang dilakukan oleh (Hafidh, 2013) juga meneliti tentang pengaruh rasio keuangan daerah terhadap belanja modal publik bagi pertumbuhan ekonomi. Penelitian tersebut dilakukan dalam kurun waktu 2006-2011 di seluruh Kabupaten Provinsi Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif dan analisis regresi sederhana data panel. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rasio kemandirian dan efisiensi daerah di seluruh daerah Provinsi Yogyakarta masih tergolong rendah sedangkan rasio Efektivitas menunjukkan bahwa seluruh daerah di Provinsi Yogyakarta memiliki rasio yang cukup efektif karena mampu melampaui target pendapatan daerahnya. Kemudian dari hasil regresi sederhana data panel menunjukkan bahwa seluruh rasio keuangan daerah tidak dapat memengaruhi belanja modal karena nilai dari R^2 nya yang hanya sebesar 0.38, akan tetapi rasio keuangan daerah dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi sebesar 35%.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dipaparkan dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah yang mana hal tersebut menggambarkan kekuatan keuangan pemerintah daerah dapat memengaruhi proporsi pengeluaran modal pemerintah daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur berdasarkan

beberapa rasio keuangan pemerintah, adapun rasio yang sering digunakan yaitu Rasio Drajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Tingkat Pembiayaan SILPA, derajat kontribusi BUMD, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi keuangan daerah, Rasio Belanja Modal, dan Rasio Pertumbuhan. Selain kinerja keuangan pemerintah, terdapat beberapa faktor lain yang dapat memengaruhi proporsi pengeluaran modal pemerintah, diantaranya yaitu faktor pendapatan pemerintah yang terdiri dari PAD, DAU, DAK, dana Bagi Hasil, dan Silpa. Faktor yang memengaruhi proporsi pengeluaran modal pemerintah tidak hanya dari sisi keuangan pemerintah tetapi juga dipengaruhi oleh luas wilayah dari pemerintahan tersebut.

Hal yang menjadi pembeda dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di seluruh Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015 sampai tahun 2019. Selain itu tidak semua pengukuran rasio keuangan sebagai proxy dari kinerja keuangan pemerintah digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian ini, adapun variabel rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rasio derajat desentralisasi fiskal, kemandirian keuangan daerah, rasio Efektivitas PAD, rasio pembiayaan SILPA, rasio ketergantungan keuangan, dan derajat kontribusi BUMD. Dalam penelitian ini peneliti tidak hanya menggunakan variabel kinerja keuangan pemerintah sebagai variabel independent, tetapi juga menggunakan variabel pendapatan utama daerah yaitu PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan DAU (dana Alokasi Khusus) yang nantinya akan dianalisis pengaruhnya terhadap pengeluaran modal pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur.

Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Metode	Variabel	Hasil
1.	(Suryantin et al., 2018)	The Effect of Regional Financial Performance on Capital Expenditure and Economic Growth in Each District/Cities in Bali Province	SEM (<i>Structural Equation Model</i>)	Belanja Modal, Rasio Independensi, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas, dan Rasio Pertumbuhan, dan Pertumbuhan Ekonomi.	<ul style="list-style-type: none"> - kinerja keuangan pemerintah daerah memiliki hubungan keterpengaruhan yang signifikan terhadap belanja modal - Kinerja keuangan pemerintah dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan keterpengaruhan yang tidak signifikan. - Hubungan keterpengaruhan antara variabel belanja modal dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil hubungan yang signifikan
2.	(D. Indiyanti & Rahyuda, 2018)	Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Bali	PLS (<i>Panel Least Square</i>)	Belanja Modal, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Tingkat Pembiayaan SILPA, derajat kontribusi BUMD, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi keuangan daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Tingkat Pembiayaan SILPA, derajat kontribusi BUMD memiliki hubungan yang positif dan signifikan - Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi keuangan daerah memiliki hubungan keterpengaruhan yang negatif tidak signifikan
3.	(Praza, 2016a)	Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Jambi	FEM (<i>Fixed Effect Model</i>)	Belanja Modal, Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan, Rasio kemandirian, Rasio Derajat Kontribusi BUMD, dan	<ul style="list-style-type: none"> - Derajat Desentralisasi memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal daerah. - variabel Rasio Ketergantungan, Rasio kemandirian, dan Rasio Derajat Kontribusi BUMD memiliki hubungan yang negatif namun tidak signifikan terhadap belanja

No	Nama Peneliti	Judul	Metode	Variabel	Hasil
				Rasio Efektivitas PAD.	modal, - variabel Efektivitas PAD tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal.
4.	(Kuntari, Chariri, & Prabowo, 2019)	Capital Expenditure of Local Government	Regresi Linier Berganda	Belanja Modal, PAD, DAU, DAK, Dana Bagi Hasil.	Seluruh variabel independen memiliki pengaruh yang positif terhadap belanja modal.
5.	(Sugiyanta, 2016)	Analisis Belanja Modal dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia	PLS (<i>Panel Least Square</i>)	Belanja Modal, PAD, DAU, DAK, Dana Bagi Hasil, SILPA.	- Variabel DAK dan SILPA memiliki pengaruh yang positif terhadap belanja modal - Variabel PAD, DAU, dan Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh yang negatif terhadap belanja modal.
6.	(Sholikhah & Wahyudin, 2014)	Analisis Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa	Regresi Linier Berganda	Belanja Modal, PAD, Dana Bagi Hasil, DAU, dan Luas Wilayah	- PAD, Dana Bagi Hasil, dan Luas Wilayah memiliki pengaruh yang signifikan - Variabel DAU memiliki pengaruh yang Tidak Signifikan.
7.	(Rochmatullah, Hartanto, & Arifin, 2016)	Determinating The Value of Capital Expenditure Allocation in Indonesia Local Government	FEM (<i>Fixed Effect Model</i>)	Belanja Modal, PAD, DAU, DAK, Ketergantungan Fiskal, Luas Wilayah, Jenis Pemerintahan, dan lokasi Pemerintahan	- Variabel luas wilayah, jenis pemerintahan lokasi pemerintahan, PAD, DAK, dan Ketergantungan Fiskal memiliki pengaruh yang signifikan dalam penentuan besar kecilnya alokasi belanja modal pemerintahan daerah di Indonesia. - Variabel DAU tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal, hal ini dikarenakan pembiayaan yang bersumber dari DAU lebih dialokasikan untuk pengeluaran rutin.
8.	(Indramawan, 2018)	The Impacts of Financial Performance of Local	Analisis Data Panel (Fix	Indeks pembangunan Manusia, Rasio	- rasio desentralisasi fiskal memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap indeks

No	Nama Peneliti	Judul	Metode	Variabel	Hasil
		Government on Human Development Index in Papua	Effect Model)	Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Rasio Belanja Modal	pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat, sedangkan rasio ketergantungan keuangan pemerintah daerah dan rasio belanja modal memiliki dampak yang negatif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia sedangkan variabel rasio Efektivitas pendapatan asli daerah berdampak negatif namun tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat
9.	(Korompot & Warongan, 2017a)	Analysis of Financial Performance in the Government of North Sulawesi.	Analisis Deskriptif	Rasio Kemandirian Keuangan, Rasio Efektivitas Pendapatan, Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Harmony, dan Rasio Pertumbuhan.	<ul style="list-style-type: none"> - Rasio kemandirin pemerintah provinsi Sulawesi Utara Mengalami peningkatan - Rasio Efektivitas Pendapatan menunjukkan pendapatan daerah efektif terhadap kinerja keuangan. - Rasio Derajat Desentralisasi menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Utara masih bergantung terhadap dana Perimbangan, dan masih terblang lemah dalam desentralisasi. - Rasio Harmony menunjukkan bahwa sebagian besar pengeluaran pemerintah masih digunakan belanja operasional dan hanya sebagian kecil yang digunakan untuk belanja modal. - Kemudian rasio pertumbuhannya dalam kurun waktu 2010-2015 kurang stabil.
10	(Hafidh, 2013)	Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Mempengaruhi Belanja	Analisis Deskriptif dan Analisis	Rasio Belanja Modal, Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efisiensi	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh Kabupaten di Provinsi Yogyakarta memiliki kemandirian yang rendah - Rasio efisiensi yang masih rendah

No	Nama Peneliti	Judul	Metode	Variabel	Hasil
		Modal Publik Bagi Pertumbuhan Ekonomi.	Regresi Sederhana Data Panel .	Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Keuangan Daerah,	<ul style="list-style-type: none"> - Rasio Efektivitas yang cukup baik karena dapat melampaui target Pendapatan daerah - Rasio Keuangan Daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap PDRB - Rasio Keuangan Daerah memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap belanja modal.
11	(Agus & Safri, 2016)	Kinerja Keuangan Daerah dan Pembiayaan Belanja Modal Kabupaten Merangin	Analisis Rasio Kinerja Keuangan dan Analisis Regresi Linier Berganda Semilog	Derajat Otonomi Fiskal, Efektivitas Keuangan Daerah, Efisiensi Keuangan Daerah, Alokasi Belanja Modal,	<ul style="list-style-type: none"> - Derajat Desentralisasi di Kabupaten Maringin dalam kurun waktu 2001-2015 masih tergolong rendah - Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maringin sudah cukup Efektif dan Efisien. - Hasil analisis regresi linier berganda semilog menunjukkan bahwa ketiga variabel kinerja keuangan daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja modal di Kabupaten Maringin.
12	(Arif & Arza, 2018)	Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2017	Metode Regresi linier Berganda Data Panel	Belanja Modal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Harmony	<ul style="list-style-type: none"> - Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Efektivitas PAD tidak memberikan pengaruh terhadap belanja modal di Kabupaten atau Kota Provinsi Sumatera Barat - Efisiensi Keuangan Daerah dan Rasio Harmony memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal.

Sumber: Berbagai Sumber Diolah.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dipaparkan dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah yang mana hal tersebut menggambarkan kekuatan keuangan pemerintah daerah dapat memengaruhi proporsi pengeluaran modal pemerintah daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur berdasarkan beberapa rasio keuangan pemerintah, adapun rasio yang sering digunakan yaitu Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Tingkat Pembiayaan SILPA, derajat kontribusi BUMD, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi keuangan daerah, Rasio Belanja Modal, dan Rasio Pertumbuhan. Selain kinerja keuangan pemerintah, terdapat beberapa faktor lain yang dapat memengaruhi proporsi pengeluaran modal pemerintah, diantaranya yaitu faktor pendapatan pemerintah yang terdiri dari PAD, DAU, DAK, dana Bagi Hasil, dan Silpa. Faktor yang memengaruhi proporsi pengeluaran modal pemerintah tidak hanya dari sisi keuangan pemerintah tetapi juga dipengaruhi oleh luas wilayah dari pemerintahan tersebut.

Hal yang menjadi pembeda dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di seluruh Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015 sampai tahun 2019. Selain itu tidak semua pengukuran rasio keuangan sebagai proxy dari kinerja keuangan pemerintah digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian ini, adapun variabel rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rasio derajat desentralisasi fiskal, kemandirian keuangan daerah, rasio Efektivitas PAD, rasio pembiayaan SILPA, rasio Efisiensi PAD, dan derajat kontribusi BUMD. Dalam penelitian ini peneliti tidak hanya menggunakan variabel kinerja keuangan pemerintah sebagai variabel independen, tetapi juga menggunakan variabel pendapatan utama daerah yaitu PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan DAU (dana Alokasi Khusus) yang nantinya akan dianalisis pengaruhnya terhadap pengeluaran modal pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur.

2.3. Kerangka Konsep Penelitian

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi baik desentralisasi demokrasi maupun desentralisasi fiskal pemerintah daerah dituntut untuk memiliki akuntabilitas yang baik untuk menciptakan *Good Government* dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Akuntabilitas pemerintah sendiri dibagi menjadi dua jenis yaitu akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan yang mana hal tersebut telah diatur pemerintah PERPRES No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Peraturan-peraturan tersebut dibentuk agar pemerintah daerah dapat mengatur dan mengelola pemerintahannya secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab (Praza, 2016a).

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas kinerja dan juga akuntabilitas keuangan pemerintah daerah yaitu dengan melihat kinerja keuangan pemerintah daerah yang mana hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan enam rasio keuangan pemerintah yaitu Rasio Derajat Desentralisasi yang mengukur besarnya campurtangan pemerintah pusat serta kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi daerahnya (D. Indiyanti & Rahyuda, 2018). Semakin terdesentralisasi suatu daerah menunjukkan bahwa semakin mandiri daerah tersebut dalam mengelola perekonomian daerahnya hal tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah daerah semakin leluasa untuk menentukan dan meningkatkan pembangunan daerah yang tercermin dalam belanja modal daerahnya tanpa adanya intervensi dari pemerintah di atasnya .

Kemudian Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahannya secara mandiri (Kartika, Setiawan, & Kusuma, 2016a). Sehingga, pada Rasio Kemandirian Keuangan dapat dilihat besarnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajaknya yang mana hal tersebut seharusnya diimbangi oleh besar kecilnya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai balas jasa atas pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat. Selanjutnya Rasio Efektivitas PAD yang mencerminkan kemampuan daerah dalam menyerap PAD (Kartika et al., 2016a). Semakin tinggirasio Efektivitas PAD menunjukkan bahwa semakin

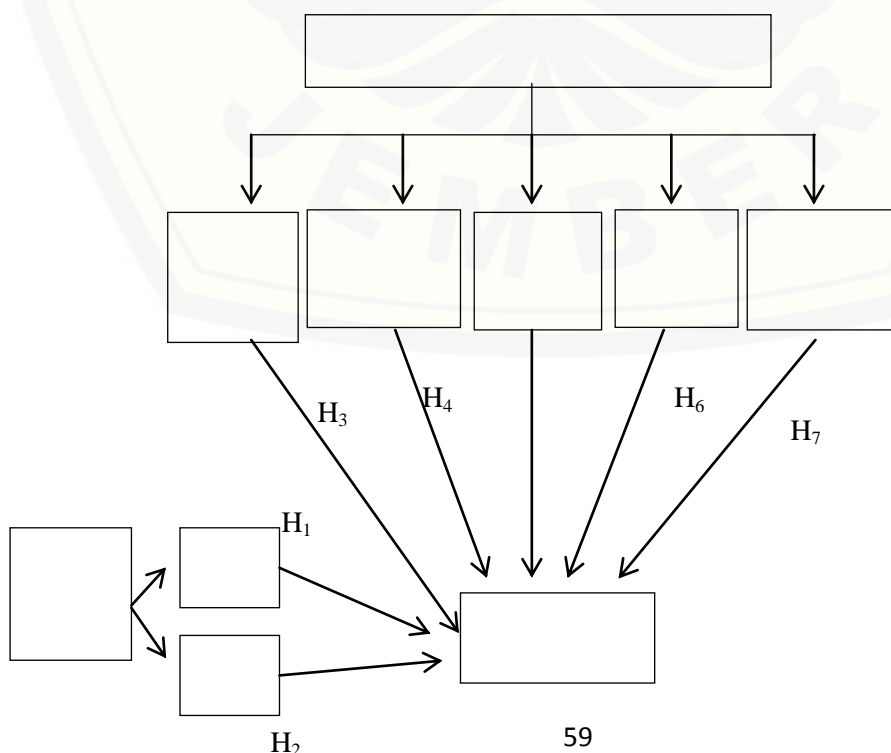
tinggi kinerja dan penerimaan PAD daerah tersebut, hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar pula pengeluaran belanja modal yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atas Pajak dan Retribusi yang dibayar oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori Federalisme Fiskal yang mengemukakan bahwa dengan adanya desentralisasi dalam pelaksanaan pemerintahan pemerintah daerah dituntut untuk mengelola sendiri keuangan dan urusan daerahnya namun jumlah pendapatan pemerintah daerah tidak dapat mencukupi untuk melakukan seluruh kegiatan daerahnya secara mandiri sehingga dibutuhkan adanya dana transfer dari pemerintah atau disebut dengan dana perimbangan.

Rasio selanjutnya yaitu Rasio Efisiensi PAD yang mencerminkan Efisiensi pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah Daerah atas besarnya PAD yang didapatkan. Rasio Efisiensi menunjukkan kebijaksanaan pemerintah daerah dalam mengalokasikan pengeluarannya semakin tinggi rasio efisiensi PAD menunjukkan bahwa pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah termasuk dalam pengeluaran yang boros, Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah yang digunakan sebagai pengeluaran modal cenderung lebih kecil. Terakhir yaitu Rasio Pembiayaan SILPA yang mencerminkan besar kecilnya alokasi pemerintah dalam memanfaatkan SILPA tahun anggaran sebelumnya sebagai pembiayaan pengeluaran pada tahun tersebut. Semakin tinggi Rasio Pembiayaan SILPA hal tersebut memungkinkan pemerintah daerah untuk meningkatkan pengeluarannya termasuk pada pos pengeluaran belanja modal.

Dengan melakukan pengukuran 6 rasio keuangan pemerintah tersebut dapat diketahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah di suatu daerah yang mana baik buruknya kinerja keuangan daerah dapat digunakan untuk mengukur kemampuan daerah dalam melaksanakan desentralisasi fiskal. Baik buruknya kinerja keuangan pemerintah daerah juga dapat digunakan untuk mengukur kekuatan dari daerah tersebut yang mana semakin besar tingkat kemandirian suatu daerah maka semakin besar pula kekuatan daerah tersebut. Oleh karena itu, semakin besar kekuatan yang dimiliki oleh daerah tersebut maka semakin besar pula usaha atau program yang dapat dilakukan oleh daerah untuk meningkatkan perekonomian

dan kesejahteraan masyarakatnya dengan meningkatkan pembangunan di wilayahnya yang tercermin dalam pengeluaran modal. Dengan kata lain pemerintah memiliki fleksibilitas yang lebih untuk membuat perencanaan pembangunan daerahnya.

Besarnya anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk pembangunan daerahnya juga dapat dilihat pada besar kecilnya pos pengeluaran belanja modal. Disisi lain, besar kecilnya pengeluaran belanja modal tidak hanya bergantung pada jumlah pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah baik berupa PAD, DAU maupun DAK, akan tetapi juga bergantung pada fleksibilitas anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah atau yang dapat disebut dengan ruang fiskal pemerintah daerah. yang juga dipengaruhi oleh baik atau buruknya kinerja keuangan pemerintah daerah.. Hal ini dikarenakan pos pengeluaran belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan jumlah Aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dengan kata lain belanja modal merupakan bentuk dari investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan juga perekonomian daerah. Sehingga dapat dikatakan bahwa baik buruknya kinerja keuangan pemerintah dapat memengaruhi besar kecilnya pembiayaan yang digunakan oleh pemerintah untuk belanja modal.



2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal

Berkaitan dengan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri termasuk juga pendanaan pemerintah pusat dan daerah dalam mendanai kegiatan pemerintah daerah (Martinez-Vazquez, 2011; Pirade, 2018). Oleh karena itu, dalam periode desentralisasi ini, pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan PAD mereka sendiri dengan memaksimalkan sumber dayanya untuk membiayai semua kegiatan pembuatan infrastruktur atau fasilitas melalui alokasi belanja modal di APBD (Lewis, 2013; Retno & Yuwanto, 2018; Tirtosuharto, 2017). Efisiensi alokasi belanja modal diwakili oleh perbandingan antara jumlah total investasi yang dikeluarkan dan target pendapatan lokal (Chapman & Gorina, 2012; Rochmatullah & Hartanto, 2016). Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di daerah, pemerintah daerah perlu menetapkan target PAD di setiap tahun fiskal (Rochmatullah and Hartanto, 2016).

Perbaikan dalam pengelolaan aset produktif daerah adalah upaya positif untuk meningkatkan produktivitas sumber daya daerah (Benos & Karagiannis, 2016; Rochmatullah & Hartanto, 2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 mengatur bahwa tujuan belanja modal adalah untuk memenuhi kebutuhan suatu daerah untuk pengembangan dan pelestarian aset daerah yang memiliki nilai ekonomi selama lebih dari satu tahun. Keberhasilan belanja modal dapat diukur dengan tingkat perkembangan ekonomi daerah (Tunaa, Kayacana, & Bekta, 2019), Teori yang mendasari hubungan antara PAD dan belanja modal yaitu desentralisasi fiskal yang menjelaskan bahwa adanya pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah untuk mengelola keuangan dan sumber daya yang dimiliki daerah dengan perencanaan anggaran yang tepat untuk menghasilkan penerimaan daerah yang maksimal. sesuai dengan Hubungan antara belanja modal dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditunjukkan oleh pelestarian dan pengembangan aset produktif lokal (Tuasikal, 2008). Berdasarkan kajian empiris

sebelumnya oleh Juniawan dan Suryanti (2018), Lestari et al, (2016) dan Solikin dan Widyawaty (2009) membuktikan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Namun terdapat kajian empiris terdahulu yang kontra terhadap hubungan antara PAD dengan belanja modal yaitu oleh Suryantini et al (2017), Badrudin dan Kuncorojati (2017) dan Syam et al (2018) yang menemukan bahwa PAD dan belanja modal tidak memiliki hubungan yang signifikan. Berdasarkan kajian teori dan empiris maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal

2.4.2 Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal

Dana alokasi umum (DAU) adalah transfer umum dari pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi ketidaksetaraan horizontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. DAU (Dana Alokasi Umum) adalah dana dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kapasitas keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam konteks desentralisasi. Berdasarkan uraian dalam UU No. 33 tahun 2004, dapat disimpulkan bahwa DAU adalah sarana untuk mengatasi kesenjangan fiskal di antara daerah, dan untuk menyediakan sumber daya pendanaan daerah. Menurut UU No. 33 tahun 2004, alokasi DAU ditetapkan setidaknya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Domestik Neto sebagaimana ditetapkan dalam APBN. Proporsi distribusi DAU untuk provinsi dan kabupaten / kota ditentukan sesuai dengan keseimbangan kewenangan antara provinsi dan Kabupaten / kota. DAU adalah salah satu komponen dan penyeimbang dalam APBN yang peruntukannya didasarkan pada konsep kesenjangan fiskal atau kesenjangan fiskal dengan perbedaan antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Teori yang mendasari hubungan antara DAU dengan belanja modal yaitu federalisasi fiskal yang menjelaskan bahwa pendelegasian wewenang oleh pusat ke daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dapat mendukung pertumbuhan ekonomi terutama dalam mengelola dana perimbangan (DAU dan DAK) untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat (Kresnandra, 2016)

Penelitian sebelumnya oleh (Nuarisa, 2013) menyatakan bahwa dana alokasi umum mempengaruhi alokasi belanja modal. Jumlah belanja modal dipengaruhi oleh dana alokasi umum yang diterima dari pemerintah pusat. Ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara DAU mentransfer dana dari pemerintah, dengan alokasi belanja daerah melalui belanja modal. Semakin tinggi DAU maka alokasi belanja modal juga meningkat. Ini karena daerah memiliki pendapatan sendiri. Beberapa studi empiris sebelumnya menyebutkan bahwa DAU memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal (Solikin dan Widyawaty, 2009; Marpaung et al, 2017; Asnawi dan Ulan, 2018). Namun juga terdapat perbedaan hasil penelitian oleh Sari dan Wirama (2018), Kusuma (2016) dan Jati et al, (2019) yang menemukan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara DAU dengan belanja modal. Berdasarkan kajian teori dan empiris maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal

2.4.3 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dan Belanja Modal

Dalam rangka melaksanakan desentralisasi, daerah setempat diberikan Neraca Fiskal melalui APBN dan melalui transfer dengan prinsip uang mengikuti fungsinya. Salah satu tujuan dari ketentuan Neraca Fiskal tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, dan antar daerah, dan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam mengeksplorasi potensi ekonomi daerah (Kuntari, Diponegoro, et al., 2019; Lewis, 2013; Smith, 2008). Teori yang mendasari hubungan antara rasio derajat desentralisasi fiskal dengan belanja modal yaitu teori desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal adalah pengalihan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat ke daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lewis, 2013; Smith, 2008). Sementara desentralisasi fiskal dapat diartikan sebagai pelimpahan wewenang di bidang pendapatan anggaran keuangan atau yang sebelumnya terpusat, baik administrasi maupun pemanfaatannya diselenggarakan atau dilaksanakan oleh pemerintah pusat (Pirade, 2018; Praza, 2016a)

Sistem dan prosedur nasional konsisten dengan prinsip-prinsip utama desentralisasi fiskal dan bahkan di bawah kondisi politik dan birokrasi nasional yang kondusif bagi pemberdayaan pemerintah daerah, desentralisasi (baik secara umum dan khusus pendapatan daerah) dapat menghadapi tantangan politik daerah yang menakutkan. Desentralisasi fiskal melibatkan pengalihan beberapa tanggung jawab untuk pengeluaran dan / atau pendapatan ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Salah satu faktor penting dalam menentukan jenis desentralisasi fiskal adalah sejauh mana entitas subnasional diberikan otonomi untuk menentukan alokasi pengeluaran mereka. Studi empiris menunjukkan bahwa Derajat Desentralisasi memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap belanja modal daerah yaitu oleh Praza (2016). Studi empiris oleh Sutjipto et al., (2019), Indiyanti dan Rahyuda (2018), dan Praza (2016) membuktikan bahwa derajat desentralisasi fiskal memiliki hubungan signifikan dengan belanja modal. Namun juga terdapat studi empiris yang menemukan bahwa tidak ada pengaruh signifikan dari desentralisasi fiskal terhadap belanja modal yaitu penelitian dari Badrudin (2011) dan Suwandi dan Tahar (2015). Berdasarkan kajian teori dan empiris maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : rasio derajat desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap belanja modal

2.4.4 Rasio Kemandirian Keuangan dan Belanja modal

Kemandirian suatu daerah dapat ditentukan oleh produktivitas pemerintah daerahnya. Kemandirian pemerintah daerah dapat digambarkan dengan nilai utang lokal dan alokasi belanja modal pemerintah daerah. (Burgan, Mcdonald, & Thomson, 1991) membuktikan bahwa kemandirian pemerintah daerah dapat dilihat dari keterkaitan antara utang daerah dan pengeluaran modal lokal. PAD kecil akan mengarah pada kemandirian pemerintah daerah yang rendah, sehingga pemerintah daerah akan bergantung pada transfer pendapatan dari pemerintah pusat (Bappenas & UNDP, 2008). Hal penting yang perlu diperhatikan bahwa pemerintah daerah dapat menentukan alokasi pengeluaran itu sendiri dibandingkan dengan amanat pemerintah pusat kepada daerah dalam mengelola

pengeluaran keuangan. Desentralisasi berpotensi mengurangi akuntabilitas dengan memutus hubungan antara tingkat perpajakan dan pengeluaran. Tanggung jawab pengeluaran utama dialihkan kepada pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pemberian layanan, tetapi ada beberapa pajak pendapatan tinggi yang dapat dibebankan kepada pemerintah daerah tanpa menciptakan distorsi ekonomi nasional.

Independensi fiskal daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD, seperti pajak dan retribusi daerah lainnya dan pembangunan daerah yang hanya dapat direalisasikan jika disertai dengan independensi fiskal yang efektif (Nufus, Supratikta, & Muchtar, 2017; Praza, 2016a; Qisthina, Khusaini, & Wahyudi, 2019). Teori agensi dapat mendasari hubungan antara belanja modal dan kemandirian keuangan daerah dengan asumsi bahwa pemerintah daerah (lembaga) dapat merencanakan, mengalokasikan, dan melaporkan anggaran daerah, seperti menggali sumber daya keuangan daerah (Fahlevi, 2017; Huda, Herwanti, & Pancawati, 2015). Ini karena pemerintah daerah memiliki lebih banyak informasi daripada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, dan pemerintah daerahlah yang memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola dan menggunakan uang lokal (Qisthina et al., 2019).

Indiyanti and Rahyuda (2018) membuktikan pada penelitiannya bahwa kemandirian keuangan daerah memiliki hubungan positif dengan belanja modal. Beberapa studi empiris membuktikan bahwa rasio kemandirian keuangan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal yaitu oleh (D. Indiyanti & Rahyuda, 2018)(Praza, 2016a)Sularso & Restianto (2011). Selain itu juga terdapat perbedaan hasil dari (Arif & Arza, 2018)(Fahd & Rasyid, 2017; Huda et al., 2015) yang membuktikan bahwa Rasio kemandirian keuangan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan kajian teori dan empiris maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄ : rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal

2.4.5 Rasio Efektivitas PAD dan Belanja modal

Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya bersandar pada anggaran lebih dari satu tahun dan akan menambah aset atau kekayaan daerah, dan kemudian akan menambah anggaran rutin terhadap biaya operasional dan pemeliharannya (Chariri et al., 2019; Kuntari, Diponegoro, et al., 2019; Rochmatullah & Hartanto, 2016). Belanja modal terdiri dari belanja publik dan pengeluaran resmi. Pengeluaran publik adalah pengeluaran yang manfaatnya dapat dinikmati langsung oleh masyarakat. Pengeluaran publik adalah pengeluaran modal yang terbentuk dalam investasi fisik (pembangunan infrastruktur) yang memiliki nilai ekonomi lebih dari satu tahun dan berdampak pada penambahan aset daerah (Mamogale, 2014; Qisthina et al., 2019). Teori federalisme fiskal dan desentralisasi fiskal juga berhasil sebagai dasar dari pengaruh Efektivitas PAD terhadap belanja modal. Ini karena penerapan desentralisasi fiskal, salah satunya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan adanya pengelolaan pendapatan asli daerah, melalui peningkatan pembangunan infrastruktur dan akan menghasilkan peningkatan belanja modal (Armawaddin & Ahmad, 2019; Qisthina et al., 2019)

Belanja modal berkaitan dengan kemampuan daerah merealisasikan pendapatan daerah. Hal ini berhubungan dengan rasio efektivitas yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh potensi nyata daerah tersebut. Semakin besar realisasi pendapatan dari pendapatan daerah dibandingkan dengan target dari pendapatan daerah, itu bisa dikatakan lebih efektif, dan sebaliknya (Korompot & Warongan, 2017b; Nufus et al., 2017). Studi empiris yang menunjukkan hasil bahwa kinerja keuangan daerah termasuk Efektivitas PAD secara langsung memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal yaitu oleh (Suryantin et al., 2018); Novianto and Hanafiah (2015), Fitri (2013) and Ardhini and Handayani (2011). Sedangkan studi empiris sebelumnya yang dilakukan oleh Indiyanti & Rahyuda (2018), Praza (2016), Arif & Arza (2018) menunjukkan bahwa rasio Efektivitas PAD tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja

modal. Berdasarkan kajian teori dan empiris maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₅ : rasio efektivitas PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal

2.4.6 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dan Belanja modal

Belanja modal adalah pengeluaran Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi anggaran lebih dari satu tahun dan akan meningkatkan aset atau properti daerah, dan selanjutnya akan meningkatkan pengeluaran rutin seperti biaya pemeliharaan dalam kelompok pengeluaran administrasi umum (Kuntari, Diponegoro, et al., 2019; Lewis, 2013; Rochmatullah & Hartanto, 2016). Pengeluaran Modal juga dapat diasumsikan sebagai pengeluaran yang dihabiskan dalam konteks pembentukan modal yang menambah aset tetap / inventaris yang menguntungkan lebih dari satu periode akuntansi, termasuk pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang mempertahankan atau menambah umur manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset (Badrudin, 2011; Fahlevi, 2017). Kinerja Keuangan Daerah adalah tingkat pencapaian suatu pekerjaan di bidang keuangan daerah yang mencakup pendapatan dan pengeluaran oleh menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui kebijakan atau ketentuan hukum selama periode anggaran. Bentuk kinerja adalah rasio keuangan yang dibentuk dari unsur Laporan Akuntabilitas Kepala Daerah / Kabupaten dalam perhitungan anggaran pemerintah daerah (Gomes et al., 2013; Korompot & Warongan, 2017b; Nufus et al., 2017).

Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi realisasi alokasi yang dilakukan pemerintah pada anggaran. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 tahun 2006 menyatakan definisi kinerja adalah output / hasil kegiatan / program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas yang dapat diukur. dan kualitas. Pengukuran kinerja memiliki beberapa tujuan. Secara umum, tujuan pengukuran kinerja (Mardiasmo, 2005: 122) untuk strategi komunikasi yang lebih baik, untuk mengukur kinerja keuangan dan nonkeuangan secara seimbang sehingga pengembangan strategi pencapaian dapat ditelusuri, untuk mengakomodasi

pemahaman akan kepentingan manajer tingkat menengah dan bawah dan memotivasi untuk mencapai kesesuaian tujuan, dan sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individu dan kemampuan kolektif rasional.

Rasio Efisiensi yaitu rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi pendapatan daerah. Semakin tinggi kinerja keuangan daerah maka semakin banyak infrastruktur dan fasilitas dibangun yang berarti belanja modal yang optimal dari pemerintah daerah. Suryantini et al. (2018), Novianto and Hanafiah (2015), Fitri (2013) and Ardhini and Handayani (2011), (Agus & Safri, 2016) melakukan studi dengan menunjukkan hasil bahwa kinerja keuangan daerah termasuk efisiensi keuangan daerah secara langsung memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Namun, terdapat perbedaan hasil penelitian oleh (D. Indiyanti & Rahyuda, 2018)(Hafidh, 2013) yang menemukan bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan rasio efisiensi keuangan terhadap belanja modal. Berdasarkan kajian teori dan empiris maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut

H₆ : rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal

2.4.7 Rasio Tingkat Pembiayaan SiLPA dan Belanja modal

Tantangan pemerintah daerah di era otonomi adalah bagaimana daerah mampu meningkatkan dan mengelola potensi dan sumber kekayaan asli untuk meningkatkan layanan publik dengan menyediakan fasilitas dan infrastruktur, serta infrastruktur regional. Realisasi semua itu terkandung dalam rencana pembangunan daerah yang dialokasikan dalam bentuk belanja modal (Armawaddin & Ahmad, 2019). Pada kasus tersebut menunjukkan bahwa belanja modal memiliki keterkaitan dengan SiLPA yang merupakan indikator efisiensi yang hanya dibentuk jika terdapat surplus dalam anggaran dan pada saat yang sama terjadi pembiayaan bersih dimana komponen penerimaan lebih besar daripada komponen pengeluaran pembiayaan (Armawaddin & Ahmad, 2019; Fahlevi, 2017; Korompot & Warongan, 2017b). Dengan kata lain bahwa SiLPA adalah indikator yang menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah.

SiLPA mengacu pada kelebihan pendapatan aktual dan pengeluaran anggaran selama periode anggaran (Peraturan No. 13 tahun 2006). SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup penerimaan melebihi pendapatan lokal, melebihi penerimaan dana perimbangan, kelebihan pendapatan lokal lainnya pendapatan yang sah, kelebihan pendapatan pembiayaan, penghematan pengeluaran, kewajiban kepada pihak ketiga hingga akhir tahun yang belum terselesaikan, dan sisanya dana melanjutkan aktivitas (Fahlevi, 2017). Pendapatan Lokal adalah sumber pendapatan penting bagi suatu daerah untuk memenuhi pengeluaran. Semakin besar pendapatan lokal yang diperoleh semakin memungkinkan daerah membutuhkan pengeluaran sendiri tanpa tergantung pada pemerintah pusat. (Armawaddin & Ahmad, 2019; D. Indiyanti & Rahyuda, 2018) menunjukkan bahwa SilPA memiliki pengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.

Studi empiris sebelumnya dari (Ardini & Handayani, 2011; Armawaddin & Ahmad, 2019; D. Indiyanti & Rahyuda, 2018) menjelaskan bahwa tingkat pembiayaan SilPa memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal. Namun, hasil berbeda ditunjukkan oleh (Huda et al., 2015) Azkiya (2011) yang menunjukkan hasil penelitian bahwa tingkat pembiayaan SilPa tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan kajian teori dan empiris maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut

H₇ : rasio tingkat pembiayaan SilPA berpengaruh signifikan terhadap belanja modal

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah *explanatory research* yang merupakan penelitian kuantitatif dalam menguji hipotesis atas suatu pengaruh atau hubungan antar variabel. Dengan demikian, penelitian ini menjelaskan tentang penelitian kuantitatif yang menguji hubungan antar variabel dengan adanya hipotesis yang dibangun. Penelitian ini menguji pengaruh kinerja keuangan dan pendapatan pemerintah terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Timur.

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi didefinisikan sebagai sekumpulan objek akan yang diteliti. Sampel diartikan sebagai elemen-elemen dari populasi. Penelitian ini menggunakan data panel yang dijadikan dasar regresi. Data panel merupakan data gabungan dari data runtut waktu (*time series*) dan *cross section*. Data *time series* yang digunakan dalam penelitian ini pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Pemilihan data tahun 2015-2019 disebabkan oleh perkembangan belanja modal yang fluktuatif. Sementara, data *cross section* yang digunakan dalam penelitian ini adalah 38 Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. Total jumlah observasi data panel yang digunakan adalah 190 Observasi.

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Data dalam laporan tahunan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dikases resmi di website <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>.

3.4 Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini akan dideskripsikan pada sub bab ini. Pada variabel kinerja keuangan yang memiliki beberapa pengukuran didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Indiyanti & Rahyuda, (2018) dan

Praza, (2016). Sementara untuk penggunaan variabel pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Pangestu et al., (2018). Dengan demikian, penggunaan variabel tersebut dapat melihat faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal di Provinsi Jawa Timur.

3.4.1 Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan pemerintah dalam rangka pembentukan modal (Pangestu, Riany, Paramita, & Sundaning, 2017). Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya (N. M. D. Indiyanti & Rahyuda, 2018). Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya, atau juga dengan membeli (Pangestu et al., 2018). Dengan demikian, belanja modal yang digunakan oleh penelitian ini adalah total belanja modal yang dikeluarkan pemerintah. Sebagai pendukung dalam regresi data belanja modal akan di log. Penggunaan log untuk menimalisir adanya asumsi klasik dan menyamakan satuan nilai (Ekananda, 2017).

3.4.2 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio derajat desentralisasi fiskal merupakan perbandingan antara pendapatan asli daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah. Rasio derajat desentralisasi dapat diformulasikan sebagai berikut (Pangestu et al., 2018; Praza, 2016b).

$$\text{rasio derajat desentralisasi} = \frac{\text{PAD}}{\text{total pendapatan daerah}} \times 100\% \quad (3.1)$$

3.4.3 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diukur dengan perbandingan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Formulasi rasio efektivitas sebagai berikut (Pangestu et al., 2018; Praza, 2016b).

$$\text{rasio efektivitas} = \frac{\text{realisasi penerimaan PAD}}{\text{target penerimaan PAD}} \times 100\% \quad (3.2)$$

3.4.4 Rasio Kemandirian Keuangan

Rasio kemandirian keuangan daerah merupakan perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan transfer pusat, provinsi dan pinjaman. Dengan demikian, formulasinya sebagai berikut (Pangestu et al., 2018; Praza, 2016b).

$$\text{rasio kemandirian} = \frac{PAD}{\text{transfer pusat} + \text{provinsi} + \text{pinjaman}} \times 100\% \quad (3.3)$$

3.4.5 Rasio Efisiensi Keuangan

Rasio efisiensi keuangan diperoleh dari membandingkan realisasi belanja modal dengan total realisasi penerimaan pendapatan. Dengan demikian, formulasinya sebagai berikut (Pangestu et al., 2018; Praza, 2016b).

$$\text{rasio efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{realisasi penerimaan pendapatan}} \times 100\% \quad (3.4)$$

3.4.6 Rasio Pembiayaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Rasio pembiayaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dapat diukur dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dengan total belanja. Rasio pembiayaan SiLPA dapat diformulasikan sebagai berikut (Pangestu et al., 2018; Praza, 2016b).

$$\text{rasio pembiayaan SiLPA} = \frac{SiLPA}{\text{total belanja}} \times 100\% \quad (3.5)$$

3.4.7 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah melalui sumber yang berdasarkan pada peraturan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang dirumuskan. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dirumuskan sebagai berikut (Pangestu et al., 2017).

$$PAD = HPD + RD + PLD + LPS \quad (3.6)$$

Keterangan

HPD : Hasil Pajak Daerah

RD : Retribusi Daerah

PLPD : Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah

LPS : Lain-lain Pendapatan yang Sah

3.4.8 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan anggaran pemerintah daerah yang bersumber dari celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal merupakan kebutuhan fiskal daerah dikurangi dengan kapasitas fiskal. Kebutuhan fiskal terdiri dari kebutuhan pendanaan daerah yang digunakan untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Kapasitas fiskal merupakan sumber pendanaan daerah yang bersumber dari PAD dan Dana Bagi Hasil. Sementara, Alokasi Dasar merupakan alokasi anggaran yang didasarkan pada jumlah pegawai negeri sipil daerah. Rumus sumber DAU sebagai berikut (Pangestu et al., 2017).

$$\text{Celah Fiskal} = \text{Kebutuhan Fiskal} - \text{Kapasitas Fiskal} \quad (3.7)$$

$$\text{Dana Alokasi Umum} = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar} \quad (3.8)$$

3.5 Metode Statistik

Spesifikasi model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini memodifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Indiyanti & Rahyuda, (2018); Pangestu et al., (2018) dan Praza, (2016).

$$Y_{it} = a + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + \beta_6 X_{6it} + \beta_7 X_{7it} + \varepsilon_{it} \quad (3.9)$$

Persamaan (3.10) menjelaskan bahwa belanja modal (Y) dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah (X1), dana alokasi umum (X2), rasio derajat desentralisasi fiskal (X3), kemandirian keuangan daerah (X4), rasio Efektivitas PAD (X5), rasio pembiayaan SiLPA (X6), dan rasio ketergantungan keuangan (X7).

3.6 Pengujian dan Analisis Statistik

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Panel Least Square* (PLS). *Panel Least Square* (PLS) merupakan alat analisis panel statis. Pada alat analisis *Panel Least Square* (PLS) terdapat tiga model yang perlu dilakukan untuk menentukan model.

Model *Pooled Least Square* (PLS) memiliki konsep bahwa mengasumsikan perilaku antar individu sama dalam kurun waktu (Deniz, Stengos, & Yazgan, 2018; Maryaningsih, Hermansyah, & Savitri, 2012; Muye & Hassan, 2016). Teknik ini merupakan teknik yang paling sederhana untuk menganalisis model

data panel, yaitu dengan menggabungkan data *cross section* dan *time series* tanpa melihat adanya perbedaan waktu dan entitas (individu). Kemudian data gabungan ini diperlakukan sebagai satu kesatuan pengamatan yang digunakan untuk mengestimasi model dengan metode OLS, dimana N adalah jumlah unit *cross section* dan T merupakan *time series*. Parameter α dan β untuk tetap konstan efisien diperlukan regresi yang lebih besar dengan melakukan N x T observasi (Deniz et al., 2018; Maryaningsih et al., 2012).

Berbeda dengan alat analisis *Fixed Effect Model* (FEM) yang membangun konsep terdapat perbedaan antar individu dari intercept masing-masing individu (Maryaningsih et al., 2012; Muye & Hassan, 2016). Penggunaan *Fixed Effect Model* (FEM) jika terdapat kondisi terjadi korelasi antara efek individu dengan regresinya. Terdapatnya variabel-variabel yang tidak semuanya masuk dalam persamaan model memungkinkan adanya *intercept* yang tidak konstan. Sehingga *intercept* ini mungkin berubah untuk setiap individu dan waktu. Sedangkan slope antar individu adalah tetap (sama). Teknik ini menambahkan model *dummy* pada data panel untuk menangkap adanya perbedaan *intercept* antar individu atau antar unit *cross section*. Pendekatan ini dikenal dengan sebutan model efek tetap (*Fixed Effect* atau *Least Square Dummy Variabel*) atau disebut juga *covariance model* (Ekananda, 2017).

Model panel yang ketiga adalah *Random Effect Model* (REM) dengan asumsi tidak ada korelasi antara efek individu dengan regresinya (Maryaningsih, Hermansyah, & Savitri, 2014). Model efek random perbedaan individu dan waktu dicerminkan lewat *error*. Teknik ini juga memperhitungkan bahwa *error* mungkin berkorelasi sepanjang *time series* dan *cross section*. Terdapat dua komponen yang mempunyai kontribusi pada pembentukan *error*, yaitu individu dan waktu maka *random error* pada REM juga perlu diurai menjadi *error* untuk komponen individu dan *error* untuk komponen waktu.

Penggunaan ketiga model tersebut dalam penelitian ini akan dipilih model yang terbaik untuk dapat dilakukan estimasi. Pemilihan model dapat dilakukan dengan uji chow yang membandingkan model PLS dengan FEM (Falah, Mustafid, & Sudarno, 2016). Uji Hausman yang ditujukan untuk membandingkan model

FEM dan REM dan uji Lagrange Multiplier yang digunakan untuk memiliki model REM atau PLS.

3.6.1 Uji Hipotesis

a) Uji F-statistik

Uji F-Statistik atau uji kelayakan model merupakan pengujian yang dilakukan untuk menguji pengaruh simultan variabel dependen (Y) dengan independent (X) (Ekananda, 2017). Ketika terdapat pengaruh yang simultan antara variabel dependen (Y) dengan independent (X) maka model yang digunakan masuk dalam kriteria cocok atau fit. Pengujian ini dapat dilakukan dengan melihat pada hasil regresi yang dilakukan dengan program *Eviews*, yaitu dengan membandingkan tingkat signifikansi. Apabila tingkat signifikansi $p\text{-value} \leq \alpha$ maka H_a diterima. Sebaliknya apabila signifikansi $p\text{-value} \geq \alpha$ maka H_a ditolak. Dalam penelitian ini α yang digunakan adalah 1%, 5% dan 10% (Lutkepohl & Kratzig, 2004). Tingkat signifikansi digunakan ketiganya untuk dapat memberikan gambaran hubungan variabel. Hipotesis yang berlaku sebagai berikut.

H_0 : variabel independen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen

H_a : variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen

b) Uji t-Statistik

Uji t-Statistik merupakan pengujian parsial yang dilakukan untuk menguji pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen (Lutkepohl & Kratzig, 2004). Pengujian ini dapat dilihat melalui hasil probabilitas (t-statistik) dari setiap variabel independen $\leq \alpha$ maka H_a diterima. Sebaliknya jika hasil probabilitas (t-statistik) dari setiap variabel independen $\geq \alpha$ maka H_a ditolak. Hipotesis yang berlaku sebagai berikut.

H_0 : variabel independen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen

Ha: variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen

c) Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Lutkepohl & Kratzig, 2004). Nilai koefisien determinasi adalah di antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas (Lutkepohl & Kratzig, 2004). Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Asumsi Klasik merupakan syarat yang perlu dipenuhi dalam mencapai persamaan regresi yang valid sebagai alat penduga (Lutkepohl & Kratzig, 2004).

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah model yang digunakan dalam penelitian untuk menguji hipotesis mempunyai residual yang berdistribusi normal atau tidak. Model yang baik dan tidak mengandung bias untuk prediksi adalah model yang nilai residualnya berdistribusi normal (Baltagi 2008). Pengujian normalitas, menggunakan hasil uji *Jarque-Bera* yang dihasilkan dari *residual diagnostics* pada software Eviews 10. Model regresi mempunyai residual yang berdistribusi normal jika nilai probabilitas yang dihasilkan lebih besar dari 0,05 ($\alpha > 0,05$).

2. Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan guna mengetahui apakah terdapat hubungan yang kuat diantara variabel independen. Suatu model regresi linear akan menghasilkan estimasi yang baik apabila model tersebut tidak mengandung multikolinieritas. Gejala multikolinieritas yang terjadi dalam model dapat dilihat dari nilai R-square yang sangat tinggi, tidak terdapat satupun t-statistik yang signifikan baik pada $\alpha = 10\%$, $\alpha = 5\%$, ataupun $\alpha = 1\%$, dan mempunyai standar error yang tinggi. Untuk menguji multikolinieritas, dalam penelitian ini

menggunakan nilai korelasi antar variabel bebas yang dihasilkan dari pengujian *coefficient diagnostics*. Model tidak mempunyai gejala multikolinieritas ketika nilai korelasi tidak melebihi 0,90.

4. Uji Heteroskedastisitas

Heterokedastisitas merupakan suatu keadaan yang dalam hal ini varian dari kesalahan pengganggu tidak konstan untuk semua nilai variabel bebas, yaitu $E(X_i, \mu_j) \neq 0$, sehingga $E(\mu_i)^2 \neq d^2$. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap salah satu asumsi tentang model regresi linier berdasarkan metode kuadrat terkecil. Di dalam regresi, biasanya kita berasumsi bahwa $E(\mu_i)^2 = d^2$, untuk semua μ_i , artinya untuk semua kesalahan pengganggu, variannya sama. Menurut Ghozali (2013: 142) salah satu cara dalam menguji heterokedastisitas pada data panel dengan menggunakan uji Glejser. Uji Glejser menggunakan residual yang dijadikan absolut di estimasi dengan variabel independen. Ketika nilai probabilitas diatas 5% menunjukkan tidak adanya heterokedastisitas pada model.

5. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) (Lutkepohl & Kratzig, 2004). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Pada penelitian ini untuk menguji ada tidaknya gejala autokorelasi menggunakan uji *Durbin-Watson* (*DW test*). Dasar Pengambilan Keputusan Metode pengujian Durbin-Watson (uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Jika nilai durbin-watson lebih kecil dari dL atau lebih besar dari $(4-dL)$ maka terdapat autokorelasi.
- b) Jika nilai durbin-watson terletak antara dU dan $(4-dU)$, maka tidak ada autokorelasi.

Jika nilai durbin-watson terletak antara dL dan dU atau diantara $(4-dU)$ dan $(4-dL)$, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis, penelitian ini menemukan hasil terkait dengan pengaruh kinerja keuangan dan komponen APBD terhadap belanja modal di seluruh wilayah kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur. Hasil tersebut sebagai berikut:

1. PAD memiliki koefisien positif signifikan dalam memengaruhi belanja modal di provinsi Jawa Timur.
2. DAU memiliki koefisien negatif signifikan dalam memengaruhi belanja modal di provinsi Jawa Timur.
3. Rasio desentralisasi fiskal memiliki koefisien negatif signifikan dalam memengaruhi belanja modal di provinsi Jawa Timur.
4. Rasio kemandirian keuangan memiliki koefisien negatif signifikan dalam memengaruhi belanja modal di provinsi Jawa Timur.
5. Rasio efektivitas PAD memiliki koefisien positif namun tidak signifikan dalam memengaruhi belanja modal di provinsi Jawa Timur.
6. Rasio efisiensi keuangan memiliki koefisien positif signifikan dalam memengaruhi belanja modal di provinsi Jawa Timur.
7. SiLPA memiliki koefisien positif namun tidak signifikan dalam memengaruhi belanja modal di provinsi Jawa Timur.

5.2 Keterbatasan Penelitian.

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang telah dipaparkan pada Sub bab 5.1, terdapat beberapa keterbatasan pada penelitian ini yaitu:

1. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data Panel dengan jumlah *Cross Section* 38 Kabupaten dan Kota serta *time series* 5 tahun (2015-2019) di seluruh Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, hasil analisis ini tidak dapat menjelaskan secara rinci variabel-variabel yang dapat memengaruhi belanja modal di masing-masing daerah di Jawa timur, mengingat

karakteristik dan kinerja keuangan pemerintah dari masing-masing daerah sangat berbeda.

2. Metode yang digunakan hanya terbatas pada data panel statis sehingga belum dapat menjelaskan perubahan data secara dinamis.

5.3 Saran.

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan, dan kesimpulan dari penelitian ini, maka saran yang dapat dipertimbangkan untuk digunakan baik untuk penelitian selanjutnya pada ruang lingkup penelitian ini maupun untuk instansi terkait yaitu:

1. Pada penelitian selanjutnya peneliti dapat menggunakan data longitudinal dan alat analisis data longitudinal guna mengkaji dan menganalisis variabel-variabel yang dapat memengaruhi pengeluaran belanja modal dari masing-masing daerah.
2. Peneliti pada penelitian selanjutnya juga dapat memasukkan beberapa variabel yang mungkin dapat memengaruhi pengeluaran belanja modal pemerintah seperti variabel luas wilayah, variabel Rasio Harmony, Variabel perencanaan pembangunan daerah dan variabel lainnya.

5.4 Implikasi Penelitian.

Implikasi dari hasil penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua hal yaitu Implikasi teoritis yang berkaitan perkembangan teori belanja modal dan kinerja keuangan pemerintah daerah serta implikasi praktis yang berkaitan dengan belanja modal pemerintah daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur.

1. Implikasi Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis yang berkaitan dengan pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

2. Implikasi Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi praktisi dan pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan peningkatan pengeluaran belanja modal pemerintah daerah, kinerja keuangan pemerintah, dan Pendapatan Asli Daerah khususnya pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur.



DAFTAR BACAAN

- Abu, N dan Abdullahi, U. (2010). *Government Expenditure and Economic Growth in Nigeria, 1970-2008: A Disaggregated Analysis*. Business and Economic Journal, 4(3): 237-330.
- Agus, E., & Safri, M. (2016). Kinerja Keuangan Daerah dan Pembiayaan Belanja Modal Kabupaten Merangin. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 4(1), 37–50.
- Ankamah, S., & Yao, F. (2013). Evaluating the Effectiveness of Local Revenue Mobilization in Kumasi, Ghana. *JOURNAL OF LOCAL SELF-GOVERNMENT*, 11(3), 431–451. [https://doi.org/10.4335/11.3.431-451\(2013\)ISSN](https://doi.org/10.4335/11.3.431-451(2013)ISSN)
- Ardini, & Handayani, S. (2011). MODAL UNTUK PELAYANAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF TEORI KEAGENAN (STUDI PADA KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA TENGAH). *Jurnal Universitas Diponegoro*, Semarang.
- Arif, M., & Arza, F. I. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2017. *Jurnal Riset Manajemen & Akuntansi*, 9(2), 21–36.
- Armawaddin, M., & Ahmad. (2019). DOMINANT FACTORS AFFECTING CAPITAL REALIZATION IN SOUTHEAST SULAWESI. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 16(1).
- Arsa, I K dan Setiawina, N.D. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali Tahun 2006 S.D. 2013. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 20 (2):104-111
- Badrudin, R. (2011). Effect of Fiscal Decentralization on Capital Expenditure, Growth, and Welfare. *Economic Journal of Emerging MARKets*, 3(3), 211–223.
- Bahl, R. (1999). Fiscal Decentralization as Development Policy.”. *Public Budgeting & Finance*.
- Bappenas,& UNDP. (2008). Studi Evaluasi (Impact) Penataan Daerah Otonom Baru Tahun 2008. Jakarta Indonesia: Direktorat Otonomi Daerah Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional.
- Benos, N., & Karagiannis, S. (2016). Do education quality and spillovers matter? Evidence on human capital and productivity in Greece ☆. *Economic Modelling*, 54, 563–573. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2016.01.015>

- Bird, R., & Wallich, C. (1993). Fiscal Decentralization and Intergovernmental Relations in Transition Economies Toward a Systemic Framework of Analysis. Policy Research Working Paper (The World Bank).
- Bojanic, A. N. (2013). *The Composition of Government Expenditure and Economic Growth In Bolivia*. Latin American Journal of Economic, 50(1): 83-105.
- Burgan, B., Mcdonald, S., & Thomson, N. (1991). GRANTS COMMISSION ASSESSMENT OF LOCAL GOVERNMENT DEBT SERVICING AND CAPITAL EXPENDITURES '. Economic Analysis and Policy, 21(1), 15–28. [https://doi.org/10.1016/S0313-5926\(91\)50002-3](https://doi.org/10.1016/S0313-5926(91)50002-3)
- Chapman, J., & Gorina, E. (2012). Effects of the Form of Government and Property Tax Limits on Local Finance in the Context of Revenue and Expenditure Simultaneity. Public Financial Publications, Inc, 19–45.
- Chariri, A., Diponegoro, U., Jatmiko, T., Prabowo, W., & Diponegoro, U. (2019). Capital expenditure of local governments. Academy of Accounting and Financial Studies Journal, 23(January).
- Coetzee, C.E. dan Kleynhans, E.P.J. (2017). *The Contribution of Public Capital Towards Economic Growth: A Kwazulu-Natal Case Study*. South African Journal of Economic and Financial Review, 20(1): 1-10.
- Davoodi, H., & Zou, H. (1998). Fiscal Decentralization and Economic Growth : A Cross-Country Study *. JOURNAL OF URBAN ECONOMICS, 43, 244–257.
- Deniz, P., Stengos, T., & Yazgan, M. E. (2018). Identification of common factors in panel data growth model. Economics Letters, 168(April), 94–97. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2018.04.021>
- Devarajan, S., Swaroop, V., & Zou, H. (1996). The composition of public expenditure and economic growth. Journal of Monetary Economics, 2, 313–344.
- Doh-Nani, R dan Dadson Awunyo-Vitor. (2012). *The Causal Link Between Government Expenditure and Government Revenue in Ghana*. Asian Economic and Financial Review, 2(2): 382-388.
- Ebel, R. (2014). Concept of fiscal decentralization and worldwide overview . World Bank Institute Globalization and Localization : Decentralization Trends and Outcomes Robert D .Ebel , Lead Economist Serdar Yilmaz , Public Sector Specialist World Bank Institute Course In, (January 2002).
- Ekananda, M. (2017). Analisis Ekonomi Data panel. Jakarta: Mitra Warena Widya.
- Fafurida, & Pratiwi, E. N. (2017). Financial independence of regencies and cities in Central Java. Economic Journal of Emerging Markets, 9(October), 199–209. <https://doi.org/10.20885/ejem.vol9.iss2.art9>

- Fahd, Y., & Rasyid, S. (2017). PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DAN IMPLIKASINYA PADA TINGKAT KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN The Effect of Regional Financial Performance on Capital Expenditure Allocation and Its Implications on Poverty and Unemployment Rate. *Jurnal Analisis*, 6(2), 194–201.
- Fahlevi, H. (2017). Revenue Budget Variance and Capital Expenditure Realization Emperical Evidence from Indonesian Local Goverments. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 9(1), 1–10.
- Falah, B. Z., Mustafid, & Sudarno. (2016). Model Regresi Data Panel Simultan Dengan Variabel Indeks Harga yang Diterima dana yang Dibayar Petani. *Jurnal Gaussian*, 5(4), 611–621. <https://doi.org/10.15797/concom.2019..23.009>
- Gomes, R. C., Alfinito, S., & Albuquerque, P. H. M. (2013). Analyzing Local Government Financial Performance: Evidence from Brazilian Municipalities 2005 - 2008. Disponível Em <Http://www.anpad.org.br/rac>, 704–719.
- Hafidh, A. A. (2013). Belanja Modal Publik Bagi Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol.18 NO., 109–120.
- Halim, A dan Damayanti, T. (2007). *Pengelolaan Keuangan Daerah edisi 2*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Halim, A. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hidayat, M.F. (2013). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (JIMFEB)*, 1 (2):1-21.
- Huda, A. S., Herwanti, R. T., & Pancawati, R. S. (2015). PENGARUH KINERJA KEUANGAN, FISCAL STRESS, DAN KEPADATAN PENDUDUK TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DI NUSA TENGGARA BARAT. *ASSETS*, 5(2), 1–12..
- Indiyanti, N. M. D dan Rahyuda, H. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud*, Vol. 7, No. 9, 2018: 4713 4746 ISSN: 2302-8912 DOI: <https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2018.v7.i09.p4>
- Indramawan, D. (2018). the Impacts of Financial Performance of Local, (23).
- Jacobs, D. F. (2009). Public Financial Management Technical Guidance Note Fiscal Affairs Department. Fiscal Affairs Department IMF, (April).
- Jatitmas, R. (2015). Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 11 (1):50-57.

- Jin, T dan Zhang, J. (2011). *Effect of Local Government Expenditure on The Ratio of Output to Capital: Evidence From Panel Data at China's Provincial Level*. *Frot. Econ. China*, 6(2): 249-270.
- Kappeler, A., & Vällilä, T. (2008). Fiscal federalism and the composition of public investment in Europe. *European Journal of Political Economy*, 24(3), 562–570. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2008.06.002>
- Kartika, D., Setiawan, & Kusuma, I. (2016b). PAD PADA LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN SUKABUMI AN ANALYSIS OF INDEPENDENCY RATIO , LOCAL REVENUE EFFECTIVENESS RATIO , AND LOCAL REVENUE EFFICIENCY RATIO OF THE BUDGET REALIZATION REPORT IN SUKABUMI REGENCY. *Jurnal Sosial Humaniora*, 7(2), 143–151.
- Kartika, D., Setiawan, A., & Kusuma, I. (2016a). Analisis Ratio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi PAD pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabuki. *Jurnal Sosial Humaniora*, 7(2), 143–151.
- Kayode, A., Kuranga, J dan Lukman, A.F. (2015). *Modeling Nigerian Government Expenditure, Revenue And Economic Growth: Co-Integration, Error Correction Mechanism And Combined Estimators Analysis Approach*. *Asian Economic and Financial Review*, 5(6): 858-867.
- Kee, J. E. (2004). FISCAL DECENTRALIZATION : THEORY AS REFORM. The George Washington University, <https://www.researchgate.net/publication/251886012>.
- Korompot, R., & Warongan, J. (2017a). Analysis of Financial Performance in the Government of North Sulawesi. *Accountability*, 6(2), 9. <https://doi.org/10.32400/ja.17755.6.2.2017.9-19>
- Korompot, R., & Warongan, J. (2017b). ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE IN THE GOVERNMENT OF NORTH SULAWESI. *Jurnal Accountability*, 6(2), 9–19.
- Kresnandra, A. A. N. A. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Dana Perimbangan Dan Investasi Swasta Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 3(2).
- Kuntari, Y., Chariri, A., & Prabowo, T. J. W. (2019). Capital expenditure of local governments. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 23(1).
- Lewis, B. (2013). Local Government Capital Spending in Indonesia : Impact of Intergovernmental Fiscal Transfers. *Public Financial Publications, Inc.*, (January). <https://doi.org/10.1111/j.1540-5850.2013.12002.x>
- Lutkepohl, H., & Kratzig, M. (2004). *Applied Times Series Econometrics*. United Kingdom: Cambridge University Press.

- Mamogale, M. J. (2014). Financial Performance of Local Government in Limpopo Province , 2010- - - 2012. *African Studies Quarterly*, 15(1).
- Martinez-Vazquez, J. (2011). The Impact of Fiscal Decentralization Issues in Theory and Challenges in Practice. Asian Development Bank. <https://doi.org/10.1142/S1793993310000160>
- Martini, R., Sari, K. R., Somadi, T., & Karman, I. W. (2019). Financial Independence of The South Sumatra Regional Government. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 354(January). <https://doi.org/10.2991/icastss-19.2019.75>
- Maryaningsih, N., Hermansyah, O., & Savitri, M. (2012). Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* (Vol. 53). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Muye, I. M., & Hassan, A. F. S. (2016). Does Islamic Insurance Development Promote Economic Growth? A Panel Data Analysis. *Procedia Economics and Finance*, 35(October 2015), 368–373. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(16\)00045-9](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(16)00045-9)
- Nuarisa, S. A. (2013). PENGARUH PAD, DAU DAN DAK TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL. *Accounting Analysis Journal*, 2(1).
- Nufus, K., Supratikta, H., & Muchtar, A. (2017). Analysis of Financial Performance of Local Government through South Tangerang Calculation of Realization Regional Budget. *European Journal of Business and Management*, 9(3), 136–146.
- Nursadi, H. (2004). Perubahan Paradigma Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan UU NO. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. *Hukum dan Pembangunan*
- Nwosu, D.C. dan Okafor, O.H. (2014). *Government Revenue and Expenditure in Nigeria: A Disaggregated Analysis*. *Asian Economic and Financial Review*, 4(7): 877-892.
- Oates, W. E. (1993). Fiscal Decentraliation and Economic Development. *National Tax Journal*, 46(2), 237–43.
- Oates, W. E. (2006). On the Theory and Practice of Fiscal Decentralization. IFIR WORKING PAPER SERIES, (February).
- Pangestu, P., Riany, M., Paramita, E. J. ., & Sundaning, E. K. (2017). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, 3(1), 87. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Pangestu, P., Riany, M., Paramita, E. J. ., & Sundaning, E. K. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal: Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Jambi 2009-2017, (April), 15–16.

- Patricia, C.N dan Izuchukwu, C.D. (2013). *Impact of Government Expenditure in Nigeria: A Disaggregated Analysis*. Asian Economic and Financial Review, 1(2): 64-71.
- Pirade, R. (2018). Evaluating financial performance in local government : A study in South Sulawesi Province (Indonesia). Research in Business and Management, 5(2). <https://doi.org/10.5296/rbm.v5i2.12791>
- Praza, E.I. (2016). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif dan Pembangunan Daerah*, 4 (1):25-35.
- Prihastuti, A.H, Taufik, T dan Agusti, R. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Riau. *Jurnal SOROT*, 10 (2):143-154
- Puspaningsih, D.P.D dan Aryani, N.K.L (2016). Kinerja Keuangan Daerah Sebagai Pemoderasi Pengaruh Dana Bagi Hasil dan Belanja Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15 (3):2213-2239.
- Qisthina, F. A., Khusaini, M., & Wahyudi, S. T. (2019). Analysis of Regional Financial Independence Towards Economic Growth and Human Development Index (Case Study : SWP Gerbangkertasusila Plus). *Wacana*, 22(1), 47–51.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Retno, N., & Yuwanto. (2018). Regional Autonomy Dynamics in The Reformation Era : Transitioning the Authority of Environment Policies in Central Java Province. *E3S Web of Conferences* 73, 9001. <https://doi.org/https://doi.org/10.1051/e3sconf/20187309001>
- Robson, M., & Kant, S. (2007). The development of government agency and stakeholder cooperation : A comparative study of two Local Citizens Committees (LCCs) participation in forest management in Ontario , Canada. *Forest Policy and Economics*, 9(December 2019), 1113–1133. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2006.12.002>
- Rochmatullah, M. R., Hartanto, R., & Arifin, A. (2016). Determinating The Value of Capital Expenditure Allocation in Indonesia Local Government. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 17(2), 152. <https://doi.org/10.23917/jep.v17i2.2082>
- Sholikhah, I., & Wahyudin, A. (2014). Analisis Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 553–562. <https://doi.org/10.15294/aaj.v3i4.4224>

- Smith, B. (2008). The Origins of Regional Autonomy in Indonesia: Experts and the Marketing of Political Interests. *Journal of East Asian Studies*, 8, 211–234.
- Sugiyanta, S. (2016). Analisis Belanja Modal Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 14(1), 19. <https://doi.org/10.19184/jauj.v14i1.2504>
- Sularso, HH dan Restianto, Y.E. (2011). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Media Riset Akuntansi*, 1 (2):109-124
- Suryantini, N. P. S., Darmayanti, N. P. A., & Candraningrat, I. R. (2018). THE EFFECT OF REGIONAL FINANCIAL PERFORMANCE ON CAPITAL EXPENDITURE AND ECONOMIC GROWTH IN EACH DISTRICT / CITIES IN BALI PROVINCE. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, VI(11), 673–686.
- Suwandi, K. A., & Tahar, A. (2015). PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DENGAN ALOKASI BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota D.I. Yogyakarta). *Jurnal InFestasi*, 11(2), 118–136.
- Tamawiy, J., Jullie J. S, dan Jessy D.L. W. (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik (Studi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*, 7 (2):103-124.
- Tiebout, C. M. (1961). *An Economic Theory of Fiscal Decentralization* (Vol. I). Princeton University Press.
- Tirtosuharto, D. (2017). DOES FISCAL DECENTRALIZATION HELP INDONESIA AVOID THE MIDDLE-INCOME TRAP? *Asian Development Bank Institute*, (729).
- Trafimow, D., Amrhein, V., Areshenkoff, C. N., & Barrera-causil, C. (2018). Manipulating the Alpha Level Cannot Cure Significance Testing, (May), 1–19.
- Triyanto, D., Wahyudi, S.T., dan Ananda, C.F., (2017). The Effect of Capital Expenditure on Local Own-Source Revenue: Study In East Java Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan Vol. 10 No. 2 ▪ Agustus 2017*
- Tuasikal, A. (2008). PENGARUH DAU , DAK , PAD , DAN PDRB TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA DI INDONESIA. *JURNAL TELAHAH & RISET AKUNTANSI*, 1(2), 142–154.
- Tunaa, K., Kayacana, E., & Bekta, H. (2019). The Relationship Between Research & Development Expenditures and Economic Growth : The Case of Turkey.

- World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, 195(October 2015), 501–507. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06.255>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004.
- Usman, S. (2002). Regional Autonomy in Indonesia : Field Experiences and Emerging Challenges The conference jointly organized by : Indonesian. SMERU Working Paper, (July 2002).
- Venkataraman, S dan Arabi, U.(2017). *Development Expenditure, Fiscal Consolidation and Public Revenue in India*. International Journal of Accounting and Economics Studies, 5(1): 16-18.
- Weingast, B. R. (2014). Second Generation Fiscal Federalism: Political Aspects of Decentralization and Economic Development. World Development, 53, 14–25. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.01.003>
- Yushkov, A. (2016). Fiscal decentralization and regional economic growth : Theory , empirics , and the Russian experience . Russian Journal of Economics, 1(4), 404–418. <https://doi.org/10.1016/j.ruje.2016.02.004>

LAMPIRAN

Data Penelitian

Kabupaten/Kota	Tahun	Total realisasi belanja modal	Realisasi PAD	Realisasi DAU	Rasio Derajat Desentralisasi	Rasio Kemandirian Keuangan	Rasio Efektifitas PAD	Rasio Efisiensi Keuangan	Rasio SiLPA
Pacitan	2015	268,151,647,437	126,449,078,417	714,847,233,000	8.863686186	10.48937551	141.3320005	18.79659451	54.60137675
	2016	379,167,000,000	150,466,067,821	807,908,000,000	9.8502747	10.72872014	136.9451103	24.82220185	7.465439139
	2017	346,602,302,143	202,090,671,761	793,715,346,000	14.01514106	16.29954533	145.2481002	24.03713201	15.40230886
	2018	271,920,244,654	185,153,427,758	793,715,346,000	10.35246805	13.10274692	119.2810373	15.2038538	0
	2019	23,521,005,063	97,672,724,904	817,563,878,000	5.395107425	13.70418814	58.72423379	1.299219912	0
	2015	324,169,328,852	210,695,348,135	993,319,105,000	11.28602477	12.90952116	118.87084	17.36432772	52.88613104
	2016	376,403,000,000	240,111,242,356	1,062,580,000,000	11.84782334	12.8883298	112.876773	18.57287565	18.76087544
	2017	465,255,813,619	308,232,104,639	1,043,916,636,000	13.91442732	17.65760894	136.9118281	21.00290043	9.72629279
	2018	403,302,695,098	289,017,741,958	1,038,913,988,811	12.56416333	15.04364094	122.5475468	17.5323525	32.84629708
	2019				5.64087	12.93683	54.36	1.6746	0

	019	39,954,527,942	134,580,707,541	1,084,713,444,000	7843	117	706772	72511	
Tren	2015	327,136,709,459	155,254,334,899	839,497,985,000	10.04718454	11.81594927	125.1098036	21.17044199	71.42508635
	2016	362,840,000,000	182,174,224,010	901,380,000,000	11.15826595	11.48137713	128.1024852	22.22413868	42.31756382
	2017	352,598,950,701	253,224,852,674	885,545,437,000	14.13328105	17.12656508	143.944978	19.6796642	49.53471852
	2018	311,421,059,015	233,808,792,639	885,545,437,000	12.81593729	15.34197493	117.4918556	17.07015685	15.76643537
	2019	19,524,335,580	132,642,410,601	912,478,590,000	5.952355551	16.8187765	47.34348351	0.876158589	0
Tulu	2015	444,587,079,517	309,646,333,190	1,111,457,117,000	13.06669491	16.61930192	145.3668413	18.76102865	64.06117427
	2016	574,341,000,000	342,570,441,401	1,172,560,000,000	13.32813476	15.8601488	142.4512596	22.34546044	36.40639314
	2017	395,842,837,980	503,103,394,882	1,151,959,732,000	19.36424795	25.0330883	167.6365382	15.23583212	52.48274752
	2018	370,661,902,571	453,153,465,280	1,151,959,732,000	16.77384089	21.916566	126.1278167	13.72034919	0
	2019	10,750,253,035	219,598,308,830	1,192,530,621,000	6.326979089	20.77898292	49.96228793	0.309732013	0
Blita	2015	508,331,950,780	216,648,256,570	1,037,911,125,000	10.21160752	12.14418475	122.4419112	23.95997297	55.96944693
	2016	692,719,000,000	224,106,651,0	1,128,510,000,	10.00364131	11.09034439	114.7957253	30.92149374	19.865078

	6		51	000					05
	2017	593,444,438,952	322,878,943,149	1,108,687,006,000	13.99068988	16.79531273	149.4535187	25.71458214	15.99090349
	2018	409,773,750,053	252,453,245,801	1,109,812,753,000	10.73296245	12.90560398	112.3334764	17.42138929	58.01671907
	2019	55,207,068,761	110,676,459,102	1,153,914,324,000	4.583458768	11.12370107	46.63772817	2.286297605	0
Kediri	2015	457,787,623,448	314,229,578,679	1,177,392,295,000	13.55862457	16.20583822	115.1345985	19.75297979	111.5837137
	2016	612,052,000,000	339,113,703,719	1,242,230,000,000	14.1549745	15.42441205	116.2245674	25.54771559	77.3799339
	2017	675,279,276,055	533,985,244,135	1,220,408,783,000	19.64327046	24.85756377	183.2976112	24.84093633	63.01557087
	2018	547,123,553,524	476,905,008,818	1,225,331,641,000	16.62877401	21.09508896	105.3217991	19.07716161	0
	2019	10,755,126,912	167,010,517,353	1,275,628,643,000	4.949329161	14.15728407	42.71413949	0.318726414	0
Malang	2015	714,192,895,223	461,887,704,825	1,613,161,777,000	13.30597275	17.50618147	138.6264491	20.57433247	49.29954955
	2016	683,932,000,000	502,754,956,803	1,694,880,000,000	14.61655366	18.77143719	127.320992	19.88389899	31.79329567
	2017	740,344,342,433	743,313,499,676	1,665,110,987,000	19.8650696	25.74039378	174.3656746	19.7857188	39.44836304
	2018	718,439,018,703	585,290,988,836	1,665,195,901,000	15.30416272	19.38948	119.6114347	18.78571148	0

	2019	29,514,163,352	237,031,487,674	1,716,472,214,000	5.739422536	15.61761259	45.06518664	0.714648741	0
Lumajang	2015	242,225,159,241	212,585,093,436	923,492,395,000	12.44979031	14.35315971	124.8720203	14.18562511	129.1423338
	2016	347,886,000,000	242,111,890,948	990,248,000,000	13.14031435	14.30112239	136.6280002	18.88106933	53.27503804
	2017	347,886,000,000	324,253,671,100	972,852,929,000	16.57630281	19.92510353	127.3276547	17.78442063	37.61211542
	2018	288,428,035,221	270,169,877,127	972,852,929,000	13.00521758	15.6811249	102.3166441	13.88411393	48.89423369
	2019	16,598,214,097	148,481,804,818	1,003,092,909,000	6.505400384	16.38704071	47.76323755	0.727213873	0
Jember	2015	556,408,885,143	461,882,363,147	1,586,836,602,000	14.82033647	17.59078854	90.91253908	17.85339201	78.03683005
	2016	460,451,000,000	524,137,794,426	1,709,890,000,000	16.42036962	17.73292834	108.0514126	14.42516775	141.069413
	2017	708,870,975,184	719,213,581,070	1,688,226,251,000	20.66654509	26.16441824	136.6390486	20.36935113	80.3151111
	2018	532,247,571,649	597,509,388,023	1,697,477,217,000	16.6489413	21.31296303	101.3963414	14.83049263	131.735634
	2019	7,576,475,715	289,599,910,709	1,697,477,217,000	7.311451103	25.30729349	45.92304396	0.191281246	0
Banyuwangi	2015	699,415,745,318	346,992,331,407	1,288,940,680,000	12.48556312	16.49522767	139.3337412	25.16654878	53.16522198
	2019	911,584,	367,87	1,400,3	13.1120369	17.80526379	119.765029	32.49140923	9.0033

	1 6	000,000	3,334,0 63	80,000, 000			4		075 99
	2 0 1 7	657,077, 214,260	388,94 3,532,8 61	1,375,7 84,247, 000	14.2364 68	17.58508 881	100.0 83905 4	24.050 943	5.8 096 357 03
	2 0 1 8	480,382, 663,298	450,06 6,949,2 15	1,375,7 84,247, 000	15.0140 2256	17.14370 36	85.33 99395 3	16.025 34058	13. 547 085 7
	2 0 1 9	90,947,1 91,773	249,31 2,137,6 10	1,438,0 46,053, 000	7.46493 6075	19.01670 238	43.60 92453 3	2.7231 52508	0
Bon dow oso	2 0 1 5	404,576, 533,409	158,97 4,210,1 44	862,59 9,540,0 00	8.83053 7938	11.41991 944	130.1 21330 7	22.473 00631	44. 569 760 16
	2 0 1 6	425,425, 000,000	177,02 6,080,7 20	926,59 6,000,0 00	9.10131 0284	10.87594 387	127.9 87261 9	21.872 05926	28. 390 813 1
	2 0 1 7	383,574, 373,763	229,15 1,109,4 30	910,31 9,122,0 00	11.9045 4978	14.49207 984	149.0 39434 2	19.926 93921	26. 094 560 44
	2 0 1 8	284,801, 344,676	203,23 9,207,7 18	910,31 9,122,0 00	9.70139 344	12.32630 704	109.0 23266 8	13.594 66969	70. 697 657 2
	2 0 1 9	25,297,8 72,395	102,35 9,388,3 64	940,84 8,730,0 00	4.97777 2916	11.34278 927	52.94 66356 5	1.2302 44397	0
Situ bond o	2 0 1 5	340,683, 173,357	148,50 7,958,9 84	787,72 8,919,0 00	9.76794 7155	11.51486 704	117.8 97423 1	22.408 05986	56. 115 881 51
	2 0 1 6	416,864, 000,000	173,83 5,882,0 70	821,08 4,000,0 00	10.9982 1614	9.784686 489	106.1 21561 6	26.374 07374	34. 052 304 66
	2 0 1 7	345,382, 416,018	228,52 3,663,3 74	806,66 0,581,0 00	14.1024 2632	13.06542 28	134.1 09632 5	21.313 8981	51. 351 090 89
	2 0 1 8	398,444, 375,447	187,28 7,219,4 49	806,66 0,581,0 00	10.6680 6644	10.10254 298	101.2 32005 6	22.695 78822	0.0 463 758 11

	2019	17,792,868,339	81,806,413,394	831,861,637,000	4.680740264	10.85518162	43.20858312	1.018059487	0
Probolinggo	2015	343,189,339,904	207,370,345,161	956,969,595,000	11.25666358	13.21869735	126.5750835	18.62931241	75.23724246
	2016	289,648,000,000	221,719,063,825	977,570,000,000	11.23566194	12.47988334	109.8737645	14.67797561	49.00838235
	2017	326,769,685,304	302,046,061,277	961,711,263,000	14.32015642	17.26893153	137.4890859	15.49231593	54.27603793
	2018	242,838,333,931	234,483,636,963	967,345,237,000	10.72491936	12.64838587	106.1909367	11.10705029	0.076092521
	2019	23,689,335,724	97,707,480,614	1,008,758,706,000	3.995758794	12.96515034	41.84847202	0.968778142	0
Pasuruan	2015	464,634,017,141	478,269,057,788	1,089,359,282,000	18.98977994	24.62812386	128.4101483	18.4483976	116.9374385
	2016	838,440,000,000	480,758,498,043	1,200,610,000,000	17.03942794	20.2993399	106.2550544	29.71666237	21.52794146
	2017	492,094,079,745	759,945,807,967	1,179,520,941,000	24.8043048	33.41971799	152.3217347	16.06173942	28.43097646
	2018	447,987,653,723	614,302,515,368	1,179,777,625,000	19.26943538	23.86882276	107.2880182	14.0524724	39.72636245
	2019	19,966,406,903	302,494,249,804	1,222,938,444,000	8.492692946	24.01524809	47.01858838	0.560567889	0
Sidoarjo	2015	936,192,614,541	1,266,786,727,409	1,206,659,789,000	35.62172853	67.26679179	116.1575963	26.32550408	61.33796893
	20	809,998,	1,335,2	1,225,2	36.40320833	52.02305176	110.924073	22.08257444	72.097

	16	000,000	84,797,901	60,000,000			1		98084
	2017	565,233,558,275	1,671,806,819,697	1,203,737,401,000	41.32320411	70.86860454	127.6120965	13.97126834	156.2275857
	2018	810,565,148,333	1,685,558,666,147	1,191,856,625,000	38.90428913	67.78137232	117.784524	18.7086107	126.8519886
	2019	58,310,757,753	810,071,520,929	1,255,835,073,000	17.85639939	67.73272446	50.53462699	1.285343519	0
Mojokerto	2015	491,829,693,652	414,965,865,275	923,747,632,000	19.5907622	27.70122583	103.7390549	23.21954497	77.47968578
	2016	442,333,000,000	447,620,810,612	991,180,000,000	20.61625133	27.41943324	108.1804404	20.37270852	65.66875793
	2017	576,646,344,208	500,518,075,941	973,768,511,000	21.43058108	33.00519815	114.7433233	24.69014972	51.97287762
	2018	554,143,666,841	546,289,352,326	973,768,511,000	22.43838026	34.1170513	115.0594171	22.76098969	61.28720378
	2019	20,177,503,423	253,753,881,375	1,001,947,249,000	10.11826289	30.05233487	50.64236763	0.804564183	0
Jombang	2015	403,219,792,974	363,963,252,972	1,032,325,237,000	16.91838901	22.50058773	142.1034689	18.74318151	83.43974965
	2016	364,902,000,000	374,140,907,476	1,111,300,000,000	16.57641607	21.80760563	120.8815093	16.16708372	62.58483566
	2017	387,322,559,622	521,236,583,750	1,091,779,457,000	20.70861872	30.65186566	151.3393002	15.388243	88.87274306
	2018	293,715,521,337	438,197,175,439	1,091,779,457,000	17.43869417	25.20357382	108.9846742	11.68883652	0

	2019	14,063,673,602	229,416,404,358	1,123,009,264,000	8.56458519	26.45223072	52.24379498	0.525025797	0
Nga njuk	2015	361,295,978,864	287,881,055,209	1,024,223,014,000	14.26887334	17.04573183	121.2263948	17.90769649	95.02976017
	2016	447,730,000,000	323,045,476,639	1,078,700,000,000	15.4016987	16.22997583	115.0411687	21.34622849	52.15092278
	2017	319,990,242,921	332,495,541,853	1,059,746,429,000	14.45784178	17.91289159	107.7586111	13.91407619	96.51012706
	2018	339,783,946,855	361,586,738,454	1,059,436,592,960	15.25972208	19.01547302	109.7481244	14.33959834	105.4507625
	2019	21,036,096,512	141,645,901,237	1,102,764,455,000	5.961935788	13.31867292	41.3240728	0.885418184	0
Mad iun	2015	327,742,397,091	149,628,355,468	832,357,223,000	9.2194588	10.70729584	116.2826368	20.19408365	77.46779345
	2016	443,808,000,000	163,635,265,621	893,566,000,000	9.473400187	9.971568392	108.0518021	25.69354946	27.14346739
	2017	374,316,928,090	241,944,162,780	877,868,685,000	13.76199228	16.09899648	135.1495918	21.29146913	21.83162099
	2018	291,642,038,612	219,041,431,267	877,862,289,224	11.97221093	14.12514102	118.0730675	15.94036335	0
	2019	10,418,903,001	105,102,699,042	904,957,172,000	5.494436973	13.05592165	52.41408027	0.544667324	0
Mag etan	2015	239,657,455,207	164,564,899,426	856,278,521,000	10.65195094	12.31230774	133.967361	15.51253921	69.6791436
	2019	286,944,	165,61	916,05	9.915096776	10.18998276	113.592158	17.17861827	16.361

	16	000,000	7,367,152	2,000,000			5		45187
	2017	201,215,680,487	212,806,288,638	899,960,340,000	12.10575954	13.95632256	144.7661827	11.44641288	81.15121102
	2018	194,944,111,688	196,826,063,936	899,960,340,000	10.76262435	12.51143252	118.8137936	10.65971753	0.057554957
	2019	23,576,159,834	78,091,598,650	936,329,137,000	4.186691543	8.963150874	40.51461461	1.263978593	0
Nga wi	2015	313,226,242,409	191,166,217,182	995,119,303,000	9.997272375	11.66275767	137.7536491	16.38055147	110.8810771
	2016	355,375,000,000	195,606,664,464	1,058,210,000,000	9.889915056	10.43000847	120.8033375	17.96783649	74.8792754
	2017	379,215,035,738	275,721,180,047	1,039,619,057,000	13.80930208	16.12968803	165.2887667	18.99271931	50.48926072
	2018	307,436,987,487	223,871,715,022	1,039,619,057,000	11.82890903	13.3919203	123.8396807	16.24432169	75.58125973
	2019	11,780,613,156	118,856,777,538	1,072,348,573,000	5.449191847	12.30434151	56.32779568	0.540102319	0
Bojo nego ro	2015	594,229,176,810	337,695,825,018	895,987,113,000	11.64962567	13.49705397	128.4250449	20.49935759	56.11000816
	2016	967,917,000,000	340,408,041,197	949,118,000,000	11.33150751	9.702636231	117.0329629	32.22003427	8.167196966
	2017	573,456,669,154	448,188,138,725	932,445,113,000	14.82005409	17.46134468	136.2258524	18.96225741	48.44619901
	2018	601,338,047,081	425,167,970,431	932,357,598,649	8.814050746	10.68437061	115.4858876	12.4661885	0

	2019	77,737,831,063	266,469,885,203	966,444,954,000	6.523596616	12.30629698	55.22161116	1.903142831	0
Tuban	2015	386,655,657,749	345,965,620,447	955,939,873,000	17.14521585	21.13892404	132.5847858	19.16171526	76.04151926
	2016	464,180,000,000	364,133,005,606	1,046,760,000,000	16.67622641	19.91257163	121.2221227	21.25808607	57.01381223
	2017	497,409,334,515	497,223,807,932	1,028,370,328,000	20.92229002	26.56704454	151.8777447	20.93009665	55.37709472
	2018	494,963,683,321	442,531,646,744	1,027,874,285,222	18.02085246	23.29299727	117.0226463	20.15599918	62.94709929
	2019	24,712,950,316	235,211,699,842	1,063,348,123,000	9.041740777	26.23587628	59.26863547	0.949987142	0
Lamongan	2015	459,305,792,650	321,667,133,176	1,064,300,915,000	13.20423326	16.60349855	120.5798669	18.85421356	41.29827767
	2016	616,500,000,000	403,473,674,924	1,166,660,000,000	14.83885465	18.01818791	127.2265409	22.67348395	11.40508605
	2017	505,221,589,585	429,200,063,877	1,146,161,266,000	15.80240504	24.00046296	103.9141949	18.60138631	9.955327509
	2018	531,811,348,158	436,595,179,671	1,146,161,266,000	15.53132216	23.44177278	92.58373567	18.91851711	8.128318701
	2019	112,033,026,791	222,503,676,728	1,183,848,580,000	7.049187429	23.39187045	44.14885926	3.549342715	0
Gresik	2015	584,223,675,905	799,884,870,104	873,265,959,000	32.83365626	49.45845923	94.97592549	23.98120038	20.10180513
	2019	413,340,	715,48	923,46	28.36875139	37.63770582	77.3513293	16.3888798	16.418

	1 6	000,000	1,463,1 45	9,000,0 00			7		080 67
	2 0 1 7	422,641, 766,003	871,56 4,498,2 47	907,24 6,643,0 00	31.7833 8597	47.06225 082	91.77 63322 7	15.412 49833	16. 056 741 21
	2 0 1 8	369,883, 330,557	957,25 5,706,2 69	909,88 8,092,0 00	33.2802 9636	51.68935 659	101.0 22113	12.859 49698	97. 867 957 67
	2 0 1 9	62,937,4 00,053	458,69 1,949,3 34	963,13 6,830,0 00	13.4331 1755	45.57392 905	50.41 09559	1.8431 66191	0
Ban gkal an	2 0 1 5	480,529, 384,071	175,62 4,054,2 91	888,67 3,426,0 00	9.82401 2678	10.74252 436	143.8 60619	26.879 72772	41. 099 274 58
	2 0 1 6	412,823, 000,000	200,08 2,919,2 82	1,012,2 40,000, 000	10.9220 2974	10.77773 515	120.5 42608 9	22.534 9825	14. 405 205 07
	2 0 1 7	296,055, 032,741	325,52 5,663,2 96	994,46 0,684,0 00	14.8773 3539	17.74834 804	170.1 96781	13.530 45401	74. 586 403 51
	2 0 1 8	324,705, 615,061	199,25 8,427,6 16	968,77 0,449,6 80	9.79562 8987	11.58139 541	95.95 38411 5	15.962 66604	42. 095 190 23
	2 0 1 9	42,215,9 38,076	118,64 4,450,2 68	1,031,0 39,347, 000	5.15816 748	11.97947 502	54.94 40746 5	1.8353 73491	0
Sam pang	2 0 1 5	630,156, 763,506	142,51 2,555,6 64	788,34 5,170,0 00	8.20562 4972	10.90031 944	117.4 89455 2	36.283 32992	36. 310 932 1
	2 0 1 6	564,000, 000,000	135,78 6,263,5 40	827,95 3,000,0 00	7.90931 7231	9.320741 749	112.2 52214 8	32.852 03379	27. 885 943 35
	2 0 1 7	374,875, 770,149	209,54 5,224,6 78	818,92 9,326,0 00	13.0548 6391	15.20036 891	156.9 08976 2	23.355 11186	23. 033 149 78
	2 0 1 8	312,562, 644,306	135,34 9,867,9 61	825,44 3,163,0 00	7.97261 0445	9.143016 655	98.61 90478 3	18.411 10184	41. 832 340 95

	2019	8,969,913,550	85,609,200,703	865,298,361,000	4.583546515	10.67632553	57.10468087	0.480252305	0
Pam ekas an	2015	447,685,501,909	170,258,936,684	817,903,633,000	10.12364587	12.07611881	136.0699941	26.6195101	56.5647788
	2016	544,166,000,000	178,479,349,149	862,936,000,000	9.764454853	11.000777	125.0108772	29.77086349	36.44458858
	2017	372,031,422,732	243,311,843,020	847,776,564,000	12.76421277	15.17345031	165.6628537	19.51688079	99.35709821
	2018	317,340,696,506	222,410,664,049	849,764,469,000	12.08030735	14.4151174	135.9145089	17.23646284	161.1489839
	2019	59,314,409,145	93,189,872,267	884,236,202,000	5.05956005	11.57273011	29.365875	3.220358689	0
Sum enep	2015	370,141,331,155	172,687,320,522	1,010,159,421,000	8.843513577	9.99298932	103.6201404	18.95535745	78.69587771
	2016	272,015,000,000	208,981,799,807	1,110,490,000,000	10.14688715	10.49810851	123.6340617	13.20739659	106.395057
	2017	291,884,664,571	190,750,065,358	1,099,838,350,000	8.826977759	10.10035235	99.37462038	13.50699114	138.6649152
	2018	353,711,734,989	185,832,755,753	1,144,489,870,000	8.281355597	9.366679333	83.97450424	15.76262831	0
	2019	18,597,689,522	115,435,258,873	1,183,078,444,000	4.794516315	10.7367864	45.35924554	0.772440992	0
Kedi ri	2015	174,462,849,355	221,927,133,611	634,461,169,000	18.07245414	23.06440345	172.4691298	14.20723907	307.06362
	2019	381,846,	238,31	617,78	20.19780283	24.15468885	124.297823	32.36199829	60.471

	16	000,000	8,108,522	1,000,000					335
	2017	243,195,558,126	293,065,134,149	606,928,225,000	23.65085238	31.06253313	144.8606354	19.62629319	82.27716018
	2018	133,226,151,028	249,093,229,531	606,558,865,000	19.48341418	24.98779503	110.2610987	10.42059748	0
	2019	3,579,652,664	119,904,827,897	623,628,225,000	10.52396458	23.19741446	53.39502941	0.314183661	0
Blitar	2015	168,336,826,221	121,264,917,469	400,654,035,000	15.75393391	19.58742805	147.1012361	21.86920414	56.7055731
	2016	203,372,000,000	847,187,702,894	428,744,000,000	100	118.0015843	102.5506081	24.00554202	31.32977002
	2017	174,989,696,378	194,764,731,104	421,212,306,000	22.88812271	29.68170859	158.3417376	20.56422444	73.84610943
	2018	160,034,400,214	163,026,005,753	421,212,306,000	18.22722867	22.81756701	116.3982841	17.89275027	131.9119483
	2019	10,918,181,171	80,602,542,713	437,776,459,000	8.756144692	21.69286422	46.41736571	1.186081368	0
Malang	2015	337,647,558,967	424,938,755,525	818,758,893,000	24.97660553	32.61694373	120.2335582	19.84589492	93.83716564
	2016	193,667,000,000	477,541,883,045	859,678,000,000	27.42296513	34.71963789	125.7196128	11.12137715	157.4897663
	2017	340,494,355,167	588,276,962,084	844,576,426,000	29.83274977	42.83565863	143.6665826	17.26717779	117.6520065
	2018	351,203,268,897	556,888,383,144	844,477,164,310	27.29585115	39.37029905	114.5081526	17.21420744	137.8597036

	2019	17,484,900,008	245,445,051,865	886,503,661,000	10.72129836	34.31010089	46.00559619	0.763758847	0
Probolinggo	2015	74,291,701,183	142,434,720,375	463,649,666,000	16.56231026	20.86389377	131.1300389	8.638639522	399.8262909
	2016	147,706,000,000	171,306,931,660	470,213,000,000	19.33080887	23.27602038	131.6014115	16.66760607	183.054722
	2017	239,181,366,936	203,937,860,276	461,952,836,000	22.38978921	28.87349051	133.7449213	26.25907902	93.40845261
	2018	162,786,989,163	175,789,670,859	461,402,648,000	17.79964473	26.3624133	104.9329036	16.48305364	0
	2019	5,400,080,108	83,520,858,239	482,709,978,000	7.749046633	29.49934409	47.47460274	0.50101823	0
Pasuruan	2015	159,178,160,741	114,734,243,910	399,095,322,000	15.53022708	19.07898547	123.7277356	21.54607812	62.6666653
	2016	172,509,000,000	147,819,093,061	432,090,000,000	18.72879549	21.96082386	133.3197238	21.85702614	61.83588921
	2017	220,001,016,826	147,981,423,536	424,499,789,000	17.56068907	22.38619547	114.15902	26.10712452	57.87469764
	2018	184,267,409,697	153,027,195,761	424,499,789,000	16.94196044	21.04306583	109.7223614	20.40062976	0
	2019	14,868,012,361	70,489,857,658	446,869,099,000	8.303022722	19.06161517	50.69999473	1.751307898	0
Mojokerto	2015	135,968,848,097	129,258,132,764	382,373,637,000	18.01396408	22.50112984	139.2235651	18.94919796	126.7739075
	20	303,737,	152,46	397,09	18.89782411	21.41259491	124.931665	37.64845282	10.244

	16	000,000	2,265,304	4,000,000			7		0381
	2017	121,144,916,729	178,295,062,137	390,118,825,000	22.79022586	29.7922672	109.1776606	15.48511765	61.42260655
	2018	119,434,272,447	182,508,304,189	378,916,109,000	20.56216417	29.44274306	90.96182013	13.45597467	0
	2019	4,097,291,246	34,304,779,323	412,487,880,000	3.872676178	11.73287918	16.65932072	0.46254436	0
Mad iun	2015	182,413,227,390	164,681,136,058	509,817,165,000	16.90911433	20.39418339	147.8560677	18.72980835	185.9158923
	2016	246,395,000,000	173,235,929,828	511,375,000,000	17.35340714	19.17349075	130.8078957	24.68190494	124.1329924
	2017	255,977,976,513	230,608,717,369	502,392,070,000	24.08131824	31.75119179	144.7414227	26.73050345	120.5145697
	2018	259,087,612,258	230,847,977,147	501,753,246,649	22.91417328	30.51211283	117.302035	25.7172643	0
	2019	20,126,764,036	122,143,795,822	522,596,024,000	11.55672886	29.25915578	59.15273917	1.904309205	0
Sura baya	2015	1,785,125,255,500	4,035,649,478,397	1,147,385,486,000	60.97039552	157.9215567	114.6446057	26.96958531	79.26221438
	2016	1,789,390,000,000	4,090,204,000,000	1,233,380,000,000	59.92313169	130.5755018	106.5390792	26.21528232	59.69301427
	2017	2,517,891,658,246	5,161,844,571,172	1,211,713,876,000	64.25340837	182.9334118	122.5343574	31.34211399	47.7380824
	2018	2,430,061,039,309	4,972,890,868,136	1,211,713,876,000	60.82883889	164.788548	105.5175556	29.72472057	49.39319629

	2019	655,414,495,410	2,331,856,207,175	1,308,697,316,000	25.67250809	176.2225017	44.92723816	7.215768229	0
Batu	2015	281,882,302,047	104,233,584,925	413,219,693,000	14.36208988	16.82336761	130.0481409	38.83987065	32.45759858
	2016	174,369,000,000	109,533,498,034	480,460,000,000	13.63289488	14.86404019	92.24702825	21.70253202	41.46878262
	2017	142,582,638,440	149,423,863,145	474,779,517,000	17.59079055	21.37660743	120.4467985	16.7854135	97.18552282
	2018	125,401,338,968	162,574,646,582	474,881,106,000	16.50605832	20.16604408	113.2922714	12.73188568	213.8268745
	2019	11,218,589,860	81,816,744,902	499,302,396,000	8.18127858	20.05437168	53.360969	1.121804699	239.0155689

Analisis Deskriptif

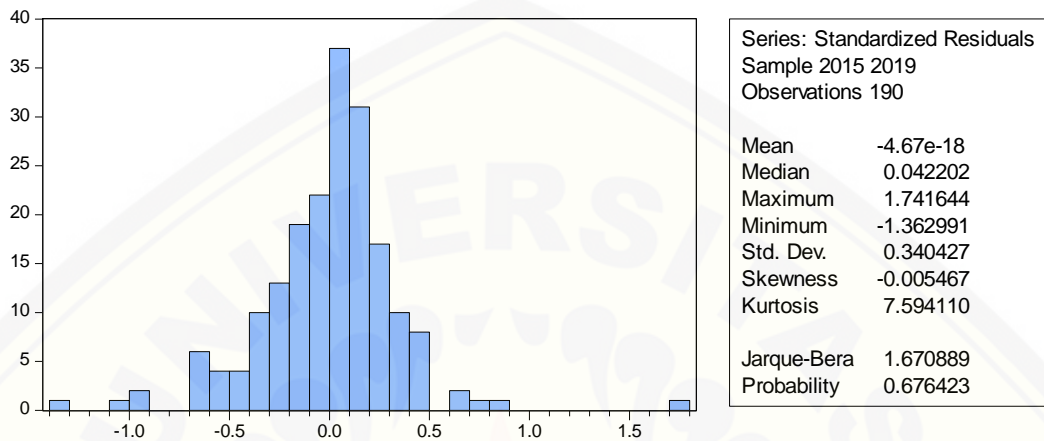
Date:
06/05/20
Time: 14:58
Sample: 2015 2019

	Y	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7
Mean	3.66E+11	4.11E+11	9.50E+11	15.73008	24.62933	108.2942	16.31602	61.57803
Median	3.41E+11	2.32E+11	9.65E+11	13.49587	17.62420	116.2536	17.93777	41.65056
Maximum	2.52E+12	5.16E+12	1.72E+12	100.0000	182.9334	183.2976	38.83987	2390.156
Minimum	3.58E+09	3.43E+10	3.79E+11	3.872676	8.963151	16.65932	0.191281	0.000000
Std. Dev.	3.42E+11	6.79E+11	3.02E+11	11.41789	26.38205	34.90122	9.029709	178.5748
Skewness	3.212022	5.279325	0.125003	3.633569	4.287324	-0.652713	-0.349512	11.81145
Kurtosis	18.99875	33.07268	3.289662	21.88425	22.82441	2.675237	2.629669	153.8846
Jarque-Bera	2353.057	8042.157	1.159056	3241.292	3693.378	14.32606	4.954090	184650.0
Probability	0.000000	0.000000	0.560163	0.000000	0.000000	0.000775	0.083991	0.000000
Sum	6.95E+13	7.81E+13	1.80E+14	2988.715	4679.573	20575.90	3100.043	11699.83
Sum Sq.	2.21E+25	8.71E+25	1.73E+25	24639.59	131546.3	230220.0	15410.24	6027014.

Dev.

Observations 190 190 190 190 190 190 190 190

Uji Normalitas



Uji Multikolinieritas

	LN_X1	LN_X2	X3	X4	X5	X6	X7
LN_X1	1.000000	0.501483	0.746228	0.744432	0.269216	0.321833	-0.065170
LN_X2	0.501483	1.000000	-0.055320	0.078212	-0.066811	-0.087575	-0.168951
X3	0.746228	-0.055320	1.000000	0.821336	0.258076	0.375854	0.025539
X4	0.744432	0.078212	0.821336	1.000000	-0.041974	0.128001	0.004897
X5	0.269216	-0.066811	0.258076	-0.041974	1.000000	0.736006	0.040044
X6	0.321833	-0.087575	0.375854	0.128001	0.736006	1.000000	-0.049779
X7	-0.065170	-0.168951	0.025539	0.004897	0.040044	-0.049779	1.000000

Uji Heterokedastisitas

Dependent Variable: RESABE
 Method: Panel Least Squares
 Date: 06/05/20 Time: 20:49
 Sample: 2015 2019
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 38
 Total panel (balanced) observations: 190

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LN_X1	-0.227734	0.109285	-1.083844	0.3893
LN_X2	0.664906	0.537257	1.237594	0.2179
X3	-0.003424	0.003929	-0.871564	0.3849
X4	0.007510	0.002842	6.421767	0.9142
X5	9.88E-05	0.000995	0.099335	0.9210
X6	-0.001915	0.002869	-0.667686	0.5054
X7	-0.000144	8.68E-05	-1.655556	0.1000

C -12.16386 14.18838 -0.857311 0.3927

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.494823	Mean dependent var	0.244010
Adjusted R-squared	0.341528	S.D. dependent var	0.224197
S.E. of regression	0.181927	Akaike info criterion	-0.367023
Sum squared resid	4.799153	Schwarz criterion	0.402009
Log likelihood	79.86722	Hannan-Quinn criter.	-0.055500
F-statistic	3.227913	Durbin-Watson stat	2.205637
Prob(F-statistic)	0.000000		

Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.329886	(37,145)	0.0002
Cross-section Chi-square	88.649143	37	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: LN_Y

Method: Panel Least Squares

Date: 06/05/20 Time: 14:05

Sample: 2015 2019

Periods included: 5

Cross-sections included: 38

Total panel (balanced) observations: 190

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-6.586141	2.564092	-2.568606	0.0110
LN_X2	0.321608	0.165390	1.944545	0.0534
LN_X1	0.832827	0.126715	6.572426	0.0000
X3	-0.016850	0.006718	-2.508355	0.0130
X4	-0.003526	0.002764	-1.275764	0.2037
X5	0.007858	0.001515	5.186866	0.0000
X6	0.086509	0.005360	16.14058	0.0000
X7	-9.79E-06	0.000178	-0.054936	0.9562

R-squared	0.898010	Mean dependent var	26.09135
Adjusted R-squared	0.894087	S.D. dependent var	1.312108
S.E. of regression	0.427016	Akaike info criterion	1.177202
Sum squared resid	33.18633	Schwarz criterion	1.313918
Log likelihood	-103.8342	Hannan-Quinn criter.	1.232584
F-statistic	228.9265	Durbin-Watson stat	1.658660
Prob(F-statistic)	0.000000		

Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: RANDOM

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	51.717019	7	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
LN_X2	-2.050785	0.306071	1.229109	0.0335
LN_X1	1.815017	0.848391	0.038544	0.0000
X3	-0.022554	-0.016733	0.000031	0.2950
X4	-0.016091	-0.003865	0.000029	0.0225
X5	0.002425	0.007845	0.000002	0.0005
X6	0.076335	0.086153	0.000013	0.0056
X7	0.000125	-0.000005	0.000000	0.1250

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: LN_Y

Method: Panel Least Squares

Date: 06/05/20 Time: 14:08

Sample: 2015 2019

Periods included: 5

Cross-sections included: 38

Total panel (balanced) observations: 190

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	34.00359	29.54709	1.150827	0.2517
LN_X2	-2.050785	1.118830	-1.832972	0.0689
LN_X1	1.815017	0.227585	7.975108	0.0000
X3	-0.022554	0.008182	-2.756462	0.0066
X4	-0.016091	0.005919	-2.718650	0.0074
X5	0.002425	0.002072	1.170445	0.2437
X6	0.076335	0.005974	12.77824	0.0000
X7	0.000125	0.000181	0.694237	0.4886

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.936037	Mean dependent var	26.09135
Adjusted R-squared	0.916628	S.D. dependent var	1.312108
S.E. of regression	0.378861	Akaike info criterion	1.100101
Sum squared resid	20.81271	Schwarz criterion	1.869133
Log likelihood	-59.50958	Hannan-Quinn criter.	1.411625
F-statistic	48.22594	Durbin-Watson stat	2.007046

Prob(F-statistic) 0.000000

Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	2.630675 (0.1048)	63.21463 (0.0000)	65.84530 (0.0000)
Honda	1.621936 (0.0524)	7.950763 (0.0000)	6.768920 (0.0000)
King-Wu	1.621936 (0.0524)	7.950763 (0.0000)	8.059577 (0.0000)
Standardized Honda	2.056272 (0.0199)	12.02889 (0.0000)	3.510194 (0.0002)
Standardized King-Wu	2.056272 (0.0199)	12.02889 (0.0000)	7.866869 (0.0000)
Gourieriou, et al.*	--	--	65.84530 (< 0.01)

*Mixed chi-square asymptotic critical values:

1%	7.289
5%	4.321
10%	2.952

Fixed Effect Model (FEM)

Dependent Variable: LN_Y

Method: Panel Least Squares

Date: 06/05/20 Time: 14:04

Sample: 2015 2019

Periods included: 5

Cross-sections included: 38

Total panel (balanced) observations: 190

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	34.00359	29.54709	1.150827	0.2517
LN_X2	-2.050785	1.118830	-1.832972	0.0689
LN_X1	1.815017	0.227585	7.975108	0.0000
X3	-0.022554	0.008182	-2.756462	0.0066

X4	-0.016091	0.005919	-2.718650	0.0074
X5	0.002425	0.002072	1.170445	0.2437
X6	0.076335	0.005974	12.77824	0.0000
X7	0.000125	0.000181	0.694237	0.4886

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.936037	Mean dependent var	26.09135
Adjusted R-squared	0.916628	S.D. dependent var	1.312108
S.E. of regression	0.378861	Akaike info criterion	1.100101
Sum squared resid	20.81271	Schwarz criterion	1.869133
Log likelihood	-59.50958	Hannan-Quinn criter.	1.411625
F-statistic	48.22594	Durbin-Watson stat	2.007046
Prob(F-statistic)	0.000000		

Pooled Least Square (PLS)

Dependent Variable: LN_Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 06/05/20 Time: 14:04
 Sample: 2015 2019
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 38
 Total panel (balanced) observations: 190

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-6.586141	2.564092	-2.568606	0.0110
LN_X2	0.321608	0.165390	1.944545	0.0534
LN_X1	0.832827	0.126715	6.572426	0.0000
X3	-0.016850	0.006718	-2.508355	0.0130
X4	-0.003526	0.002764	-1.275764	0.2037
X5	0.007858	0.001515	5.186866	0.0000
X6	0.086509	0.005360	16.14058	0.0000
X7	-9.79E-06	0.000178	-0.054936	0.9562

R-squared	0.898010	Mean dependent var	26.09135
Adjusted R-squared	0.894087	S.D. dependent var	1.312108
S.E. of regression	0.427016	Akaike info criterion	1.177202
Sum squared resid	33.18633	Schwarz criterion	1.313918
Log likelihood	-103.8342	Hannan-Quinn criter.	1.232584
F-statistic	228.9265	Durbin-Watson stat	1.658660
Prob(F-statistic)	0.000000		

Random Effect Model (REM)

Dependent Variable: LN_Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 06/05/20 Time: 14:09
 Sample: 2015 2019

Periods included: 5
 Cross-sections included: 38
 Total panel (balanced) observations: 190

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-6.586141	2.564092	-2.568606	0.0110
LN_X2	0.321608	0.165390	1.944545	0.0534
LN_X1	0.832827	0.126715	6.572426	0.0000
X3	-0.016850	0.006718	-2.508355	0.0130
X4	-0.003526	0.002764	-1.275764	0.2037
X5	0.007858	0.001515	5.186866	0.0000
X6	0.086509	0.005360	16.14058	0.0000
X7	-9.79E-06	0.000178	-0.054936	0.9562
R-squared	0.898010	Mean dependent var		26.09135
Adjusted R-squared	0.894087	S.D. dependent var		1.312108
S.E. of regression	0.427016	Akaike info criterion		1.177202
Sum squared resid	33.18633	Schwarz criterion		1.313918
Log likelihood	-103.8342	Hannan-Quinn criter.		1.232584
F-statistic	228.9265	Durbin-Watson stat		1.658660
Prob(F-statistic)	0.000000			